KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2009

Laporan Keuangan

Bagian Anggaran 015 (Audited)



Jl. Jend Gatot Subroto Kav 40-42, JAKARTA

BAGIAN ANGGARAN 015



LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2009
AUDITED
TAHUNAN

Jl . Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta Selatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Jalan Jend. Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124
Homepage : http://www.pajak.go.id

Telepon : 5250208
5262880
Faksimili : 5734793

Nomor : S - 1711 / PJ.013 / 2010 31 December 2010
Lampiran : Satu Set
Sifat : Sangat segera
Hal : Laporan Keuangan BA 015.04 dan BA 999.06 Direktorat Jenderal Pajak Tahunan Tahun 2009 - *Audited*

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. E Lt. 8 – 10
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S-1090/SJ/2010 tanggal 31 Mei 2010 hal Koreksi atas Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999.06 DJP atas Penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Belanja Subsidi BBM serta memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.5/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Keperluan Pembayaran Subsidi Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan atas Penyerahan Jasa Pemasaran oleh PT Pertamina yang menjadi dasar koreksi laporan keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. dalam surat Saudara tersebut, antara lain disampaikan bahwa Saudara meminta untuk dilakukan koreksi Penerimaan PPN Dalam Negeri pada Laporan Keuangan BA 015 dan koreksi pagu serta belanja subsidi PPN atas Laporan Keuangan BA 999.06 Direktorat Jenderal Pajak TA 2009 sebesar Rp21.460.618.475.473,00; dan
2. berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Laporan Keuangan BA 015.04 dan BA 999.06 Direktorat Jenderal Pajak TA 2009 setelah memperhitungkan koreksi sebesar Rp21.460.618.475.473,00 sebagaimana laporan keuangan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Djonifar Abdul Fatah
NIP 195207011976031001

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUNGAN ESELON I

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian laporan keuangan eselon I:

1. **Sampul Luar**
   Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. **Sampul Dalam**
   Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Eselon I dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. **Kata Pengantar**
   Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4. **Daftar Isi**
   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. **Daftar Tabel**
   Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. **Daftar Grafik**
   Merupakan daftar grafik yang terdapat laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. **Daftar Lampiran**
   Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. **Daftar Singkatan**
   Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. **Pernyataan Tanggung Jawab**

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Eselon I yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan eselon I setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. **Ringkasan**

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

11. **Laporan Realisasi Anggaran Eselon I**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Tahunan. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Tahunan. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

13. **Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Eselon I.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
   i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
   ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
   iii) Neraca Percobaan

b. Laporan barang pengguna
   i) Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
   ii) Laporan Kondisi Barang *(khusus LKKL Tahunan)*
   iii) Rincian Saldo Awal

c. Laporan Rekening Pemerintah

d. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

e. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan Eselon I dll.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN-P Nomor 26 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Revisi Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah unit Eselon I dari Departemen Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp544.670.900.447.789,00 atau 94,33 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2009. Sementara itu, realisasi Belanja Negara Netto tanpa memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga adalah sebesar Rp2.991.492.709.583,00 atau 69,49 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2009.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2009. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp64.135.829.528.130,00 dan Kewajiban sebesar Rp313.968.188.842,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp63.821.861.339.288,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat mungkin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance).* Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 31 Mei 2010
a.n Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal



DJONIFAR ABDUL FATAH
NIP 060045217

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	x
Daftar Singkatan	xi
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	xii
Pernyataan Tanggung Jawab	xiv
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA perbandingan Tahunan 2009 dan 2008)	4
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008)	5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Eselon I	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4. Kebijakan Akuntansi	13
Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	21
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
Penjelasan atas Pos-pos Neraca	45
C.1. Penjelasan Umum Neraca	45
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	46
C.3. Catatan Penting Lainnya	86
Pengungkapan Penting Lainnya	90
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI	90
D.2. Rekening Pemerintah	92
D.3 Perpanjangan Sunset *Policy*	93
D.4. Stimulus PPh Pasal 21	93
V. Lampiran	
• Neraca Percobaan	A
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	B
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	C
• Kas di Bendahara Pengeluaran dan Rekapitulasi Rekening Dipertahankan, Ditutup, dan TP PBB	D
• Daftar Rincian Piutang Pajak (Per Jenis, Umur, Penyisihan, Daluarsa, Penghapusan, Sengketa, Sita, dan PBK)	E
• Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	F
• Daftar Barang Milik Negara (BMN)	G
• Informasi Akrual Laporan Keuangan DJP	H
• Kesepakatan Bersama atas Koreksi Laporan Keuangan antara DJP dengan Tim Pemeriksa BPK RI	I

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahunan TA 2009 dan 2008	2
Tabel I.2	Neraca per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	2
Tabel IV.A.1	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	9
Tabel IV.A.3.1	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah-SAK	10
Tabel IV.A.3.2	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah-BMN	12
Tabel IV.B.1.1	Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2009	22
Tabel IV.B.1.2	Pendapatan dan Belanja Bruto Tahun Anggaran 2009	22
Tabel IV.B.1.3	Pendapatan dan Belanja Neto Tahun Anggaran 2009	22
Tabel IV.B.2.1	Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2008	23
Tabel IV.B.2.1.1	Realisasi Pendapatan Bruto per Kantor Wilayah	28
Tabel IV.B.2.1.2.a	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009	29
Tabel IV.B.2.1.2.b	Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Bruto Tahun Anggaran 2009	29
Tabel IV.B.2.1.2.c	Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Bruto Per 31 Desember TA 2009 dan TA 2008	30
Tabel IV.B.2.1.3.	Penerimaan Bukan Pajak Bruto Per 31 Desember TA 2009 dan TA 2008	31
Tabel IV.B.2.1.5.	Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Per 31 Desember TA 2009 dan TA 2008	32
Tabel IV.B.2.2.1.	Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2009	36
Tabel IV.B.2.2.2.	Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Kanwil Tahunan Tahun Anggaran 2009	38
Tabel IV.B.2.2.3.a	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi Tahunan TA 2009	39
Tabel IV.B.2.2.3.b	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi Per 31 Desember TA 2009 dan 2008	40
Tabel IV.B.2.2.4.	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahunan TA 2009	40
Tabel IV.B.2.2.4.a	Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2009 dan TA 2008	41
Tabel IV.B.2.2.4.b	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2009	42
Tabel IV.B.2.2.4.c	Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2009 dan 2008	42
Tabel IV.B.2.2.4.d	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2009	43
Tabel IV.B.2.2.4.e	Realisasi Belanja Modal Per 31 Des TA 2009 dan TA 2008	43
Tabel IV.B.2.2.5	Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga TA 2009 dan TA 2008	43
Tabel IV.B.2.2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja TA 2009	44
Tabel IV.B.2.2.7	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2009	44
Tabel IV.C.1	Neraca per 30 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited* 2008	45
Tabel IV.C.2.1.1	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	46
Tabel IV.C.2.1.2	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember TA 2009	47
Tabel IV.C.2.1.3	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	48
Tabel IV.C.2.1.4.a	Rincian Piutang Pajak per Kanwil per 31 Desember 2009	49

Tabel IV.C.2.1.4.b	Rincian Piutang Pajak per Jenis per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	50
Tabel IV.C.2.1.4.c	Rincian Piutang Pajak per Umur per 31 Desember 2009	50
Tabel IV.C.2.1.5	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	53
Tabel IV.C.2.1.6	Bagian Lancar TGR per 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	54
Tabel IV.C.2.1.7	Uang Muka Belanja per 31 Desember TA 2009 dan 2008	55
Tabel IV.C.2.1.8	Persediaan per 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	56
Tabel IV.C.2.2	Aset Tetap per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	57
Tabel IV.C.2.2.1	Rincian Aset Tetap – Tanah per Kanwil per 31 Desember 2009	59
Tabel IV.C.2.2.2	Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin per Kanwil per 31 Desember 2009	61
Tabel IV.C.2.2.3	Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Kanwil per 31 Desember 2009	64
Tabel IV.C.2.2.4	Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per Kanwil per 31 Desember 2009	67
Tabel IV.C.2.2.5	Rincian Aset Tetap – Irigasi per Kanwil per 31 Desember 2009	68
Tabel IV.C.2.2.6	Rincian Aset Tetap – Jaringan per Kanwil per 31 Desember 2009	69
Tabel IV.C.2.2.7	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Kanwil per 31 Desember 2009	70
Tabel IV.C.2.2.8	Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kanwil per 31 Desember 2009	72
Tabel IV.C.2.3.2	Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember TA 2009 dan TA 2008 *audited*	74
Tabel IV.C.2.3.4	Rincian Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud per Kanwil per 31 Desember 2009	75
Tabel IV.C.2.3.5	Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lain-lain per Kantor Wilayah per 31 Desember 2009	77
Tabel IV.C.2.4.a	Posisi Utang per 31 Desember TA 2009	78
Tabel IV.C.2.4.b	Posisi Utang per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	79
Tabel IV.C.2.4.2.a	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember TA 2009	80
Tabel IV.C.2.4.2.b	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	81
Tabel IV.C.2.4.4	Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	82
Tabel IV.C.2.5.1	Cadangan Piutang per 30 Des TA 2009 dan 31 Des 2008 *audited*	83
Tabel IV.C.2.5.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	84
Tabel IV.D.4	Rekapitulasi Saldo rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009	92

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik IV.B.2.1	Realisasi Pendapatan dan PNBP Tahunan TA 2009 dan TA 2008	24
Grafik IV.B.2.1.2	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahunan TA 2009 dan TA 2008	30
Grafik IV.B.2.1.3	Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP Tahunan TA 2009	31
Grafik IV.B.2.1.5	Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Tahunan TA 2009 dan TA 2008	33
Grafik IV.B.2.2.1.a	Perbandingan Realisasi Belanja dengan Pagu DIPA Tahunan TA 2009 dan TA 2008	35
Grafik IV.B.2.2.1.b	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Tahunan TA 2009	36
Grafik IV.B.2.2.4	Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2009	41
Grafik IV.C.1	Komposisi Neraca per 31 Desember 2009	45
Grafik IV.C.2.1.1	Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	47
Grafik IV.C.2.1.3	Perbandingan Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	48
Grafik IV.C.2.1.4	Komposisi per Jenis Piutang Pajak per 31 Desember 2009	51
Grafik IV.C.2.1.5	Komposisi per Jenis Piutang Bukan Pajak per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	53
Grafik IV.C.2.1.6	Komposisi Bagian Lancar TGR per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	54
Grafik IV.C.2.1.7	Komposisi Uang Muka Belanja per 31 Desember 2009	55
Grafik IV.C.2.1.8	Komposisi Persediaan per 31 Desember 2009	57
Grafik IV.C.2.2	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2009	58
Grafik IV.C.2.2.1	Perbandingan Aset Tetap per 30 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	58
Grafik IV.C.2.3.2	Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 30 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	74
Grafik IV.C.2.4	Komposisi Jenis Utang Per 31 Desember 2009	79
Grafik IV.C.2.4.1	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	80
Grafik IV.C.2.4.2	Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember TA 2009 dan 2008 *audited*	81
Grafik IV.C.2.4.3	Perbandingan Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	82
Grafik IV.C.2.5	Perbandingan Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	83
Grafik IV.C.2.5.1	Perbandingan Cadangan Piutang Per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	84
Grafik IV.C.2.5.3	Perbandingan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*	85

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SPMKP	:	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPMIB	:	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
UP	:	Uang Persediaan
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN DAN NERACA

		Hal.
Pendapatan Negara dan Hibah		
Catatan B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	23
Catatan B.2.1.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah	28
Catatan B.2.1.2	Pajak Dalam Negeri	29
Catatan B.2.1.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	30
Catatan B.2.1.4	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	31
Catatan B.2.1.5	Pengembalian Pendapatan Negara	32
Belanja Negara		
Catatan B.2.2	**Belanja Negara**	35
Catatan B.2.2.1	Belania	35
Catatan B.2.2.2	Belanja DJP Menurut Kanwil DJP	38
Catatan B.2.2.3	Belanja DJP Menurut Fungsi	39
Catatan B.2.2.4	Belanja DJP Menurut Jenis Belanja	40
Catatan B.2.2.5	Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)	43
Catatan B.2.2.6	Belanja DJP Menurut Jenis Satuan Kerja	44
Catatan B.2.2.7	Pengembalian Belanja	44
ASET		
Catatan C.2.1	**Aset Lancar**	46
Catatan C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	46
Catatan C.2.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	47
Catatan C.2.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	48
Catatan C.2.1.4	Piutang Pajak	48
Catatan C.2.1.5	Piutang Bukan Pajak	52
Catatan C.2.1.6	Bagian Lancar Tuntutan Tagihan Ganti Rugi	54
Catatan C.2.1.7	Uang Muka Belanja	55
Catatan C.2.1.8	Persediaan	55
Catatan C.2.2	**Aset Tetap**	57
Catatan C.2.2.1	Tanah	59
Catatan C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	61
Catatan C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	63
Catatan C.2.2.4	Jalan dan Jembatan	66
Catatan C.2.2.5	Irigasi	68
Catatan C.2.2.6	Jaringan	69
Catatan C.2.2.7	Aset Tetap Lainnya	70
Catatan C.2.2.8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	72

Catatan	C.2.3	**Aset Lainnya**	73
Catatan	C.2.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	73
Catatan	C.2.3.2	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	74
Catatan	C.2.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	74
Catatan	C.2.3.4	Aset Tak Berwujud	75
Catatan	C.2.3.5	Aset Lain-lain	76
KEWAJIBAN			
	C.2.4	**Kewajiban Jangka Pendek**	78
Catatan	C.2.4.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	79
Catatan	C.2.4.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	80
Catatan	C.2.4.3	Uang Muka dari KPPN	81
Catatan	C.2.4.4	Pendapatan Yang Ditangguhkan	82
EKUITAS			
	C.2.5	**Ekuitas Dana Lancar**	82
Catatan	C.2.5.1	Cadangan Piutang	83
Catatan	C.2.5.2	Cadangan Persediaan	84
Catatan	C.2.5.3	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka	84
	C.2.6	**Ekuitas Dana Investasi**	85
Catatan	C.2.6.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	85
Catatan	C.2.6.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	86
	C.3	Catatan Penting Lainnya	86
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA			
	D.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI	90
	D.2	Rekening Pemerintah	92
	D.3	Perpanjangan Sunset Policy	93
	D.4	Stimulus PPh Pasal 21	93

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Mei 2010
a.n Direktur Jenderal Pajak
Sekretaris Direktorat Jenderal



DJONIFAR ABDUL FATAH
NIP 060045217

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahunan TA 2009 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahunan TA Tahun 2009 ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2009 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2009. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2009 sebesar Rp544.670.900.447.789,00 atau sebesar 94,33% dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp577.391.733.361.176,00 yang terdiri-dari terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp544.661.990.676.762,00 atau mencapai 94,33% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.909.771.027,00 atau mencapai 176,45% dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya realisasi belanja Direktorat Jenderal Pajak pada TA 2009 dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp2.991.492.709.583,00 atau 69,49% dari anggarannya sebesar Rp4.305.217.063.000,00 dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak sebesar Rp1.056.807.330.401,00 menjadi sebesar Rp4.048.300.039.984,00 atau 94,03% dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahunan TA 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahunan TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2009		TA 2008	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	577.391.733.361.176	544.670.900.447.789	534.535.380.328.342	571.015.136.834.249
Belanja	4.305.217.063.000	4.048.300.039.984	4.504.740.255.000	4.113.239.927.685

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp64.135.829.528.130,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp50.146.014.666.767,00 Aset Tetap sebesar Rp13.731.730.350.246,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp258.084.511.116,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp313.968.188.842,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp63.821.861.339.288,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp49.832.046.477.925,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp13.989.814.861.362,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 dapat disajikan sebagai Tabel I.2 berikut:

Tabel I.2
Neraca Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 *audited*
(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	**31-Des-09**	**31-Des-08**	**Nilai kenaikan/ (penurunan)**
Aset	64.135.829.528.130	56.411.609.187.631	13,69%
Aset Lancar	50.146.014.666.767	45.263.026.930.750	10,78%
Aset Tetap	13.731.730.350.246	11.053.404.592.040	24,23%
Aset Lainnya	258.084.511.116	95.177.664.841	171,16%
Kewajiban	313.968.188.842	313.267.702.980	0,22%
Kewajiban Jangka Pendek	313.968.188.842	313.267.702.980	0,22%
Ekuitas Dana	63.821.861.339.288	56.098.341.484.651	13,76%
Ekuitas Dana Lancar	49.832.046.477.925	44.949.759.227.770	10,86%
Ekuitas Dana Investasi	13.989.814.861.362	11.148.582.256.881	25,48%

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

No	URAIAN	2009				2008			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**								
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	577,391,733,361,176	544,670,900,447,789	(32,720,832,913,388)	94.33	534,535,380,328,342	571,015,136,834,249	36,479,756,505,907	106.82
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	577,386,684,000,000	544,661,990,676,762	(32,724,693,323,239)	94.33	534,530,790,000,000	571,007,247,904,950	36,476,457,904,950	106.82
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,049,361,176	8,909,771,027	3,860,409,851	176.45	4,590,328,342	7,888,929,299	3,298,600,957	171.86
A.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	577,391,733,361,176	544,670,900,447,789	(32,720,832,913,387)	94.33	534,535,380,328,342	571,015,136,834,249	36,479,756,505,907	106.82
B	**BELANJA**								
B.1	Rupiah Murni	4,279,178,983,000	4,048,300,039,984	(230,878,943,016)	94.60	4,504,740,255,000	4,113,239,927,685	(391,500,327,315)	91.31
	Belanja Pegawai	1,338,853,128,000	1,115,143,378,425	(223,709,749,575)	83.29	1,208,849,076,373	1,004,896,490,194	(203,952,586,179)	83.13
	Belanja Barang	1,884,066,357,000	1,227,887,774,568	(656,178,582,432)	65.17	1,536,482,984,127	947,301,977,025	(589,181,007,102)	61.65
	Belanja Modal	1,056,259,498,000	648,461,556,590	(407,797,941,410)	61.39	1,759,408,194,500	1,254,752,296,897	(504,655,897,603)	71.32
	Pembayaran Bunga Utang	0	1,056,807,330,401	1,056,807,330,401	0.00	0	906,289,163,569	906,289,163,569	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.2	Pinjaman Luar Negeri	4,294,000,000	0	(4,294,000,000)	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal	4,294,000,000	0	(4,294,000,000)	0.00	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.3	Hibah	21,744,080,000	0	(21,744,080,000)	0.00	0	0	0	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

No	URAIAN	2009				2008			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	21,744,080,000	0	(21,744,080,000)	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	4,305,217,063,000	4,048,300,039,984	(256,917,023,016)	94.03	4,504,740,255,000	4,113,239,927,685	(391,500,327,315)	91.31
C	**PEMBIAYAAN**								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.a	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.b	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2.a	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2.b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

III. NERACA

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN /LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2009	2008	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	932,612,895	944,963,095	(12,350,200)	(1.30)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	1,822,735	(1,822,735)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	6,546,697	0	6,546,697	0.00
Piutang Pajak	49,999,727,823,996	45,173,077,395,397	4,826,650,428,598	10.68
Piutang Bukan Pajak	132,694,979	684,051,351	(551,356,372)	(80.60)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	53,764,428	118,258,820	(64,494,392)	(54.53)
Uang muka belanja	31,475,685,666	0	31,475,685,666	0.00
Persediaan	113,685,538,106	88,200,439,352	25,485,098,754	28.89
JUMLAH ASET LANCAR	**50,146,014,666,767**	**45,263,026,930,750**	**4,882,987,736,017**	**10.78**
ASET TETAP				
Tanah	5,868,476,257,110	3,736,360,295,112	2,132,115,961,998	57.06
Peralatan dan Mesin	3,365,861,808,418	3,217,317,808,089	148,544,000,329	4.61
Gedung dan Bangunan	4,011,871,869,277	3,065,068,755,475	946,803,113,802	30.89
Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,396,538,649	24,231,579,490	15,164,959,159	62.58
Aset Tetap Lainnya	188,941,009,001	191,293,118,826	(2,352,109,825)	(1.22)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	257,182,867,791	819,133,035,048	(561,950,167,257)	(68.60)
JUMLAH ASET TETAP	**13,731,730,350,246**	**11,053,404,592,040**	**2,678,325,758,206**	**24.23**
ASET LAINNYA				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	222,122,700	689,565,763	(467,443,062)	(67.78)
Aset Tak Berwujud	182,006,260,959	83,231,383,947	98,774,877,012	118.67
Aset Lain-lain	75,856,127,457	11,256,715,131	64,599,412,326	573.87
JUMLAH ASET LAINNYA	**258,084,511,116**	**95,177,664,841**	**162,906,846,275**	**171.16**
JUMLAH ASET	**64,135,829,528,130**	**56,411,609,187,631**	**7,724,220,340,498**	**13.69**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	18,736,859,944	63,500,181,137	(44,763,321,193)	(70.49)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	294,292,169,306	248,820,736,013	45,471,433,293	18.27
Uang Muka dari KPPN	932,612,895	944,963,095	(12,350,200)	(1.30)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	6,546,697	1,822,735	4,723,962	259.16
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**313,968,188,842**	**313,267,702,980**	**700,485,862**	**0.22**
JUMLAH KEWAJIBAN	**313,968,188,842**	**313,267,702,980**	**700,485,862**	**0.22**
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	50,031,389,969,069	45,173,879,705,568	4,857,510,263,501	10.75
Cadangan Persediaan	113,685,538,106	88,200,439,352	25,485,098,754	28.89

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN /LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2009	2008	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka	-313,029,029,250	-312,320,917,150	(708,112,100)	0.22
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	**49,832,046,477,925**	**44,949,759,227,770**	**4,882,287,250,155**	**10.86**
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	13,731,730,350,246	11,053,404,592,040	2,678,325,758,206	24.23
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	258,084,511,116	95,177,664,841	162,906,846,275	171.16
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	**13,989,814,861,362**	**11,148,582,256,881**	**2,841,232,604,481**	**25.48**
JUMLAH EKUITAS DANA	**63,821,861,339,288**	**56,098,341,484,651**	**7,723,519,854,636**	**13.76**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**64,135,829,528,130**	**56,411,609,187,631**	**7,724,220,340,498**	**13.69**

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 09/PB/2008 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Sektor Pajak pada Sistem Akuntansi Instansi Direktorat Jenderal Pajak.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan.

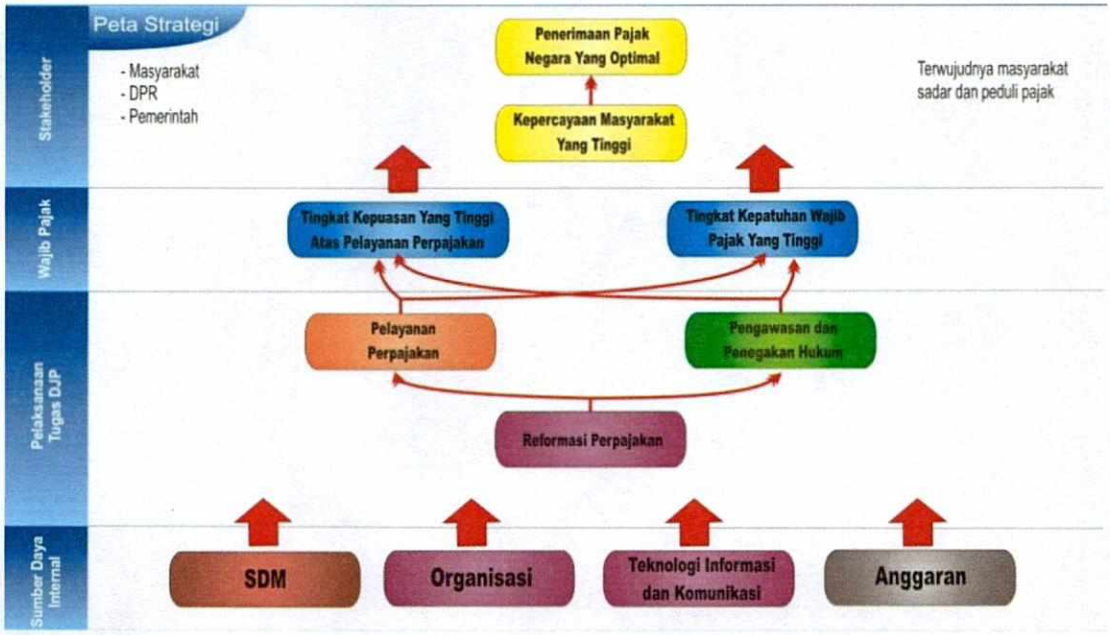
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 merupakan perwujudan visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2005-2008, dengan memperhatikan harapan *stakeholders* serta kondisi internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta stategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah penerimaan pajak yang optimal yang dapat terwujud melalui kepercayaan masyarakat yang tinggi. Adapun dua pilar utama yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Strategi yang ditempuh diawali dengan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk perbaikan proses bisnis dan kebijakan perpajakan. Selanjutnya diikuti dengan strategi peningkatan pelayanan perpajakan dan strategi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang baik membutuhkan modal dan prasyarat sumber daya internal, yaitu Sumber Daya Manusia, organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta anggaran. Peta Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dan melaksanakan langkah-langkah dan upaya-upaya nyata yang terarah dan terukur dalam mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah '**Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi**'.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi '**Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien**'.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut:

1. Integritas – Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.
2. Profesionalisme – Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.
3. Inovasi – Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.
4. *Teamwork* – Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkunganya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Pendapatan

PENDAPATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp575.441.606.530.388,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp30.770.706.082.600,00 realisasi Pendapatan Neto sebesar Rp544.670.900.447.788,00 atau 94,33 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk TA 2009 sebesar Rp577.391.733.361.176,00. Dibandingkan dengan 31 Desember 2008, Pendapatan Netto tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp26.344.236.386.461,00 atau 4,61 persen. Penurunan tersebut berasal dari penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp26.345.257.228.189,00 dan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.020.841.728,00.

Belanja

BELANJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang; dan (3) Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja TA 2009 dapat dilihat pada Tabel IV.A.1.a. dan IV.A.1.b. berikut:

Tabel IV.A.1.a.
Realisasi Belanja Netto Menurut Jenis Belanja TA 2009
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.338.853.128..000	1.115.143.378.425	83,29
2.	Belanja Barang	1.905.810.437.000	1.227.887.774.568	64,43
3.	Belanja Modal	1.060.553.498.000	648.461.556.590	61,14
4.	**Jumlah (1+2+3)**	**4.305.217.063.000**	**2.991.490.350.583**	**69,49**
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1.056.807.330.401	0
6.	**Jumlah (4+5)**	**4.305.217.063.000**	**4.048.300.039.984**	**94,03**

Tabel IV.A.1.b.
Realisasi Belanja Netto Menurut Jenis Belanja TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	2009	2008	% Naik (Turun)
1.	Belanja Pegawai	1.115.143.378.425	1.004.896.490.194	10,97
2.	Belanja Barang	1.227.887.774.568	947.301.977.025	29,62
3.	Belanja Modal	648.461.556.590	1.254.752.296.897	(48,32)
4.	**Jumlah (1+2+3)**	**2.991.492.709.583**	**3.206.950.764.116**	**(6,72)**
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	1.056.807.330.401	906.289.163.569	16,61
6.	**Jumlah (4+5)**	**4.048.300.039.984**	**4.113.239.927.685**	**(1,58)**

Realisasi Belanja Netto Direktorat Jenderal Pajak pada TA 2009 dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp2.991.492.709.583,00 atau 69,49 persen, dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak sebesar Rp1.056.807.330.401,00 menjadi sebesar Rp4.048.300.039.984,00 atau 94,03 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam TA 2009 sebesar Rp4.305.217.063.000,00.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan TA 2008, dan dengan tidak memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak, realisasi netto belanja pegawai, barang dan modal Tahunan TA 2009 mengalami penurunan 6,72 persen dari belanja Tahunan TA 2008, dan apabila dengan memperhitungkan pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak realisasi belanja mengalami penurunan 1,58 persen dari belanja Tahunan TA 2008.

Hal ini disebabkan oleh kenaikan Belanja Pegawai sebesar 10,97 persen, kenaikan Belanja Barang sebesar 29,62 persen dan penurunan Belanja Modal sebesar 48,32 persen dan kenaikan Pembayaran Bunga sebesar 16,61 persen.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahunan TA 2009 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data / laporan keuangan satuan kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Tahunan TA 2009 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp4.305.217.063.000,00 meliputi:

Satuan kerja pusat (KP)	Rp1.781.510.423.000
Satuan kerja daerah (KD)	Rp.2.523.706.640.000

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 570 unit kantor. Dari jumlah tersebut unit kantor vertikal yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 557 unit kantor, sedangkan sejumlah 13 unit kantor tidak mengelola DIPA sehingga tidak menyampaikan Laporan Keuangan. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.1. berikut:

Tabel IV.A.3.1.
Rekapitulasi Jumlah Satuan kerja Menurut Wilayah - SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam Di Banda Aceh	13
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Ii Di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung Di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Di Jakarta	14

110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Di Jakarta	10
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Ii Di Bekasi	18
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Di Semarang	22
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Di Surakarata	18
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Ii Di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Iii Di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara Di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara Di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Dan Maluku Di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Di Jakarta	4
Jumlah		557

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 015 juga mengelola dana yang berasal dari BA 999 Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) yang terdiri dari belanja subsidi berupa pajak yang ditanggung pemerintah sebesar Rp31.190.618.475.000,00 dan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.052.611.304..000,00. Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BA 999 BAPP dibuat tersendiri.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

   Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 570 unit kantor. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dari 570 unit kantor vertikal yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sejumlah 557 unit kantor, sedangkan sejumlah 13 unit kantor tidak wajib menyampaikan Laporan Barang Milik Negara.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.A.3.2. berikut:

Tabel IV.A.3.2.
Rekapitulasi Jumlah Satuan kerja Menurut Wilayah - BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam Di Banda Aceh	13
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Di Medan	10
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Ii Di Pematang Siantar	20
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Di Pekanbaru	24
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Di Padang	28
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Di Palembang	27
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung Di Bandar Lampung	21
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Di Jakarta	17
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Di Jakarta	12
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Di Jakarta	14
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Di Jakarta	10
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Di Jakarta	10
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Di Jakarta	10

140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Di Serang	11
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Di Bandung	19
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II Di Bekasi	18
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Di Semarang	22
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Di Surakarata	18
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Di Yogyakarta	6
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Di Surabaya	14
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Ii Di Sidoarjo	23
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Iii Di Malang	23
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Di Pontianak	14
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Di Banjarmasin	28
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Di Balikpapan	15
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara Di Makassar	37
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara Di Manado	28
280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Di Denpasar	13
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Di Mataram	23
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Dan Maluku Di Jayapura	23
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Di Jakarta	4
Jumlah		557

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahunan TA 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan

diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mempempuh kebijakan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang diterima pembayaran melalui MPN dan Pemotongan SPM, dibukukan berdasarkan daftar pembayaran pajak pada MPN dan *ePayPoint* yang transaksinya dilaksanakan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember;
b. Penerimaan Pajak dalam bentuk valuta asing dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Valas dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan verifikasi;
c. Penerimaan PPh Migas dibukukan berdasarkan data penerimaan PPh Migas dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
d. Penerimaan PBB dan BPHTB dibukukan berdasarkan Laporan Bulanan, Mingguan atau Harian Penerimaan PBB dan BPHTB dari Bank Operasional III PBB;
e. Penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah dan Penerimaan Pajak-Pajak lainnya yang diterima melalui rekening BUN dibukukan berdasarkan SSP atau dokumen lain dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan verifikasi;
f. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibukukan berdasarkan SSBP dan BPN atas PNBP tersebut;
g. Pengembalian pendapatan dibukukan berdasarkan dokumen SPMKP yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

Berdasarkan bisnis proses atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, rekonsiliasi data pedapatan perpajakan dilaksanakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, *ePayPoint* atau databsae SAI dengan data trasnsaksi penerimaan pajak dalam SAU.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan asset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk tahun pajak 2007 piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
   a) Surat Tagihan Pajak;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
   d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, Piutang Pajak diakui pada saat:
   a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
   b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
   h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
   i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
   j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
   k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

i) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
j) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
k) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
l) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya Piutang Pajak tersebut dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan. Khusus untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, Piutang Pajak juga dapat berkurang karena adanya keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Sedangkan untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Dalam hal Piutang Pajak dalam bentuk valuta asing, Piutang Pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian

investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Eselon I per 31 Desember 2009 berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan yang direkam kedalam SIMAK-BMN yang kemudian dikirim ke SAK adalah harga perolehan yang berasal dari Revaluasi (penilaian kembali) oleh Tim Penertiban Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Aset tetap yang dinilai kembali adalah asset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005, sedangkan untuk tahun 2005 hingga tahun 2009 nilai perolehannya dinilai sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2008 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang

Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
   a. Penerimaan Perpajakan
   b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

2. Realisasi Belanja Negara
   a. Belanja Rupiah Murni
   b. Belanja PNBP

Realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut sebagaimana Tabel IV.B.1.1. sampai dengan IV.B.1.3. berikut:

Tabel IV.B.1.1.
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Pendapatan Negara dan Hibah	%	Belanja Negara	%
Pagu Anggaran	577.391.733.361.176	100	4.305.217.063.000	100
Realisasi Bruto	575.441.606.530.388	99,66	4.049.869.635.177	94,07
Pengembalian	30.770.706.082.600		1.569.595.193	
Realisasi Netto	544.670.900.447.788	94,33	4.048.300.039.984	94,03

Tabel IV.B.1.2.
Pendapatan dan Belanja Brutto Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan / Pagu Anggaran	Realisasi	%
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	**577.391.733.361.176**	**575.441.606.530.388**	**99,66**
Penerimaan Pajak	577.386.684.000.000	575.432.696.759.361	99,66
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.049.361.176	8.909.771.027	176,45
Realisasi Belanja Negara	**4.305.217.063.000**	**4.049.869.635.177**	**94,07**
Belanja Rupiah Murni	4.305.217.063.000	2.992.776.205.897	69,52
Belanja Rupiah Murni Imbalan Bunga	0	1.057.093.429.280	0
Belanja PNBP	0	0	0

Tabel IV.B.1.3.
Pendapatan dan Belanja Netto Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan / Pagu Anggaran	Realisasi	%
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	**577.391.733.361.176**	**544.670.900.447.788**	**94,33**
Penerimaan Pajak	577.386.684.000.000	544.661.990.676.761	94,33
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.049.361.176	8.909.771.027	176,45
Realisasi Belanja Negara	**4.305.217.063.000**	**4.048.300.039.984**	**94,03**
Belanja Rupiah Murni	4.305.217.063.000	2.991.492.709.583	69,49
Belanja Rupiah Murni Imbalan Bunga	0	1.056.807.330.401	0
Belanja PNBP	0	0	0

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp575.441.606.530.388,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp30.770.706.082.600,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp544.670.900.447.788,00 atau 94,33 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahunan TA 2009 sebesar Rp577.391.733.361.176,00. Dibandingkan realisasi pendapatan pajak Tahunan Tahun Anggaran 2008, Pendapatan Bruto Tahunan TA 2009 mengalami penurunan sebesar Rp26.344.236.386.461,00 atau 4,61 persen.

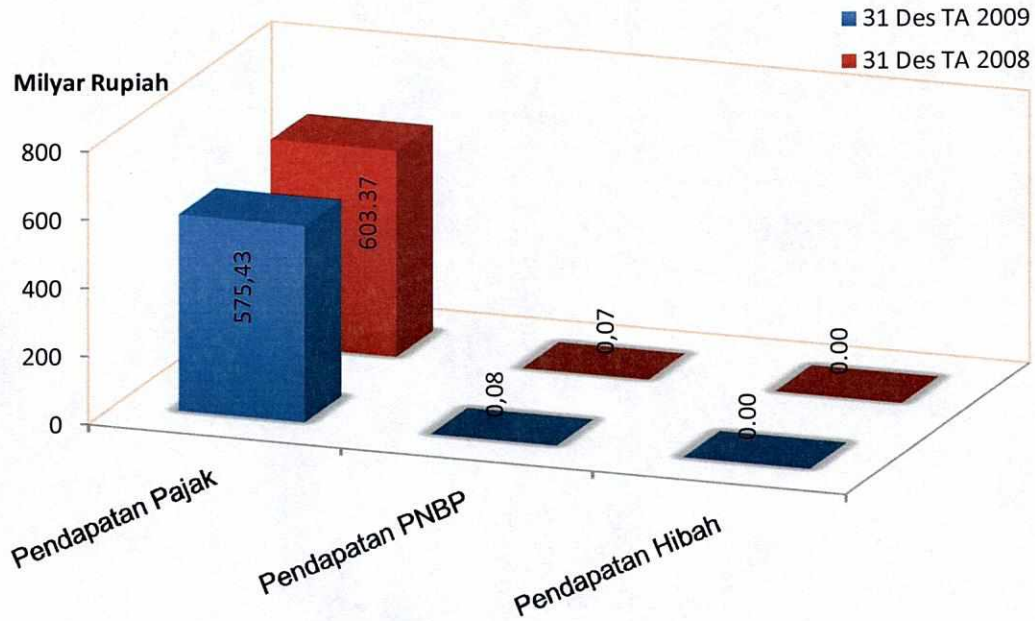
Penurunan tersebut berasal dari penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp26.345.257.228.189,00 dan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.020.841.728,00.

Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan PNBP Bruto Tahunan TA 2008 dan 2009 sebagaimana Tabel IV.B.2.1 dan Grafik IV.B.2.1 berikut:

Tabel IV.B.2.1
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Bruto Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahunan TA. 2009	Tahunan TA. 2008	% Naik (Turun)
Pendapatan Pajak	575.432.696.759.361	603.368.785.922.740	(4,61)
Pendapatan PNBP	8.909.771.027	7.888.929.299	12,94
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah	575.441.606.530.388	603.376.674.852.039	(4,61)

Grafik IV.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam milyar rupiah)



Rekonsiliasi Pendapatan

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku pengguna anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan Rp575.432.696.759.361,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 14 April 2010 telah menyelenggarakan Rekosiliasi Pendapatan Perpajakan dengan hasil sebagai berikut:

a. Rekonsiliasi Data MPN.

STATUS	SAU		SAI	
	TR	RUPIAH	TR	RUPIAH
Match	30.312.123	452.286.393.257.061	30.312.123	452.286.393.257.061
Partial Match	2.111.694	23.486.078.288.081	2.111.804	23.484.182.523.791
Unmatch	1.352	128.563.936.853	11.646	251.970.127.853
TOTAL	32.425.169	475.901.035.481.995	32.435.573	476.022.545.908.705

b. Rekonsiliasi Data Pemotongan SPM (ePayPoint)

STATUS	SAU		SAI	
	TR	**RUPIAH**	**TR**	**RUPIAH**
Match	1.768.734	14.573.301.952.437	1.768.734	14.573.301.952.437
Partial Match	219	3.076.862.436	219	3.076.862.436
Unmatch	153	309.417.030	84	141.799.354
TOTAL	1.769.106	14.576.688.231.903	1.769.037	14.576.520.614.227

c. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Melalui BUN

URAIAN	TR	SAU	SAI
Pajak Ditanggung Pemerintah	18	29.627.036.364.593	29.627.036.364.593
PPH Migas	28	50.043.674.210.538	50.043.674.210.535
Pemotongan SPM Melalui Bun	301	2.232.506.018.163	2.232.506.018.163
Setoran Pajak-Pajak Lainnya Melalui BUN	50	237.175.598.195	237.175.598.195
PPH Non Migas Dalam Valas	1.160	24.163.614.687.295	24.163.614.688.776
JUMLAH	1.557	106.304.006.878.784	106.304.006.880.262

Hasil rekonsiliasi sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan koreksi dan reklasifikasi beberapa akun pendapatan perpajakan serta melakukan klarifikasi data kepada pihak terkait. Koreksi, klarifikasi dan reklasifikasi akun pendapatan tersebut meliputi:

- data transaksi pendapatan yang *partial match* yang disebabkan perbedaan MAP tetapi masih dalam MAP pajak, dilakukan koreksi yaitu dengan melakukan reklasifikasi MAP sesuai data yang ada di SAU;
- data transaksi pendapatan yang *partial match* yang disebabkan perbedaan MAP, dari MAP pajak menjadi MAP bukan pajak, dikoreksi negatif dan dikeluarkan dari laporan keuangan, sebaliknya dari MAP bukan pajak menjadi MAP pajak dikoreksi positif, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan;
- data transaksi MPN *belum kirim* oleh bank/pos dengan status *unmatch* sejumlah 1.748 trasaksi dengan nilai Rp11.653.932.303 dikoreksi negatif dan dikeluarkan dari laporan keuangan;
- data *unmatch* baik SAU maupun SAI (MPN dan ePayPoint) dilakukan klarifikasi ke KPPN dan atau Bank/Pos terkait oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- sehubungan dengan pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK RI terdapat koreksi terhadap penerimaan DTP PPN Dalam Negeri sebesar Rp21.460.618.475.473,00.
- penerimaan pajak DTP sebesar Rp29.627.036.364.593,00 tersebut sebelum memperhitungkan koreksi negatif sebesar Rp21.460.618.475.473,00 sebagai tindak lanjut pembahasan antara Kementerian Keuangan dengan BPK-RI tanggal 27 Mei 2010.

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Selama Tahun Anggaran 2009 terdapat realisasi transaksi penerimaan pajak yang pajaknya ditanggung oleh Pemerintah (DTP) sebesar Rp29.627.036.364.594,00. Realisasi DTP sebesar Rp29.627.036.364.594,00 terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan sebesar Rp2.836.295.455.367,00 terdiri atas:

1) PPh Panas Bumi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2009 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan *energy*/Listrik Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp800.000.000.000,00;
2) PPh Atas Bunga atau Diskonto Obligasi Pemerintah berdasarkan *Bond Indenture* penerbitan *Global Bonds* Pemerintah Indonesia sebesar Rp1.500.000.000.000,00;
3) PPh PT Telkom berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telkom (Persero) Tbk. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp250.000.000.000,00;
4) PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebesar Rp207.268.255.368,00;
5) PPh atas Program Technical Forest Conservating Act (TFCA) sesuai Surat Menteri Keuangan kepada Duta Besar Amerika Serikat Nomor S-715/PMK.03/2008 sebesar Rp79.027.200.000,00

b. Pajak Pertambahan Nilai

1) PPN atas penyerahan BBM (Bahan Bakar Minyak) PT Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2009 sebesar Rp24.460.618.475.473,00
2) PPN atas penyerahan Minyak Goreng berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp800.000.000.000,00
3) PPN atas penyerahan BBN (Bahan Bakar Nabati) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.011/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp28.252.806.270,00
4) PPN dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp1.006.729.864.377,00

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB sebesar Rp495.139.763.106,00 merupakan BPHTB Pertamina yang ditanggung Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2009.

Koreksi Kurang Pajak DTP atas Transaksi Subsidi BBM

Berdasarkan kesepakatan tanggal 27 Mei 2010 antara Anggota II BPK dengan Menteri Keuangan dalam rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009, disepakati bahwa DTP PPN atas transaksi Subsidi BBM Pertamina TA 2003 sampai dengan TA 2005 dan TA 2009 sebesar Rp21.460.618.475.473,00 dikoreksi (dikeluarkan) dari Laporan Keuangan. Koreksi sebesar Rp21.460.618.475.473,00 tersebut terdiri-dari:

1. Penerimaan DTP PPN Dalam Negeri atas transaksi Subsidi BBM Pertamina tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 senilai Rp19.297.526.375.473,00 dengan nomor SP2D 025999Z tanggal 31 Desember 2009;
2. Penerimaan DTP PPN Dalam Negeri atas transaksi *Marketing Fee* PT Pertamina kepada Pemerintah tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp610.292.100.000,00 dengan nomor SP2D 026000Z tanggal 31 Desember 2009; dan
3. Penerimaan DTP PPN Dalam Negeri atas transaksi Subsidi BBM Pertamina bulan September, Oktober, dan November Tahun 2009 sebesar Rp1.552.800.000.000,00 dengan nomor SP2D 025928Z tanggal 31 Desember 2009.

Carry Over atas DTP PPN dan PPh Pasal 21.

Dari jumlah DTP sebesar Rp29.627.036.364.594,00 sebagaimana tersebut di atas, belum termasuk selisih DTP sebesar Rp1.897.654.377.380,00 yang merupakan realisasi DTP yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak 2009 dibandingkan dengan DIPA anggaran DTP yang dianggarkan di 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis DTP	Realisasi SP2D	Realisasi DTP dari Wajib Pajak	Selisih
PPN Minyak Goreng	Rp800.000.000.000,00	Rp2.594.191.735.182,00	Rp1.794.191.735.182,00
PPh Pasal 21	Rp207.268.255.368,00	Rp310.730.897.566,00	Rp103.462.642.198,00
Jumlah	Rp1.007.268.255.368,00	Rp2.904.922.632.748,00	Rp1.897.654.377.380,00

Jumlah transaksi DTP sebesar Rp1.897.654.377.380,00 tersebut melalui surat DJP nomor: S-90/PJ.08/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan No. S-79/PJ.08/2010 tanggal 12 Maret 2010 ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) diusulkan untuk dimasukan dalam APBN-P tahun 2010.

Pemindahbukuan dari Kompensasi Piutang Pajak

Sebagaimana di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan STDTD Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, setiap terjadi pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diperhitungkan dengan piutang pajak dalam tahun 2009 adalah sebesar Rp4.402.358.683.000,00 dan jumlah tersebut tidak masuk dalam penghitungan besarnya realisasi penerimaan pajak Rp575.432.696.759.361,00 sebagaimana tersebut di atas. Meskipun jumlah penerimaan pajak tersebut berpengaruh menambah jumlah realisasi penerimaan pajak secara bruto, tetapi jumlah penerimaan pajak tersebut tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak netto.

B.2.1.1. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PER KANTOR WILAYAH

Realisasi Pendapatan per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.1. berikut:

Tabel IV.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Brutto per Kantor Wilayah
(dalam rupiah)

KODE	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	REALISASI
000	Instansi Pusat	51.414.358.172.844
010	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam Di Banda Aceh	3.218.004.382.811
020	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Di Medan	8.540.580.678.099
030	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II Di Pematang Siantar	2.527.838.784.212
040	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Di Pekanbaru	11.880.684.520.347
050	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Di Jambi	4.749.149.541.721
060	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Di Palembang	6.116.149.665.361
070	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Dan Lampung Di Bandar Lampung	3.270.191.829.618
080	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Di Jakarta	25.969.445.874.246
090	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Di Jakarta	11.811.386.442.448
100	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Di Jakarta	26.491.707.767.051
110	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Di Jakarta	8.164.127.971.683
120	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Di Jakarta	9.696.244.616.934
130	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Di Jakarta	82.504.302.446.765
140	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Di Serang	9.923.180.425.043
150	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Di Bandung	10.457.953.329.410
160	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II Di Bekasi	16.252.608.499.207
170	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Di Semarang	7.445.386.548.279
180	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Di Surakarata	3.839.616.849.766
190	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Di Yogyakarta	1.701.166.471.210
200	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Di Surabaya	10.184.261.203.481
210	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Di Sidoarjo	7.108.852.937.816
220	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Di Malang	5.695.854.795.287
230	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Di Pontianak	2.178.707.337.476
240	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Di Banjarmasin	5.487.918.239.172
250	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Di Balikpapan	10.600.955.447.608
260	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara Di Makassar	5.376.262.195.752
270	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara Di Manado	3.357.734.660.922

280	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Di Denpasar	3.200.168.182.202
290	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Di Mataram	2.294.365.696.255
300	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Dan Maluku Di Jayapura	5.823.030.195.024
310	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Di Jakarta	208.159.410.822.333
	Jumlah	**575.441.606.530.388**

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Komposisi realisasi Pendapatan dirinci dalam tabel IV.B.2.1.2.a. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.a.
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Estimasi Pendapatan	Realisasi Bruto	(%)
1	Penerimaan Dalam Negeri	577.391.733.361.176	575.441.606.530.388	99.66
2	Hibah	0	0	0
TOTAL		**577.391.733.361.176**	**575.441.606.530.388**	**99.66**

Sedangkan Komposisi realisasi Penerimaan Dalam Negeri TA 2009 dapat dilihat pada Tabel Tabel IV.B.2.1.2.b. berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.b.
Realisasi Pendapatan Bruto Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

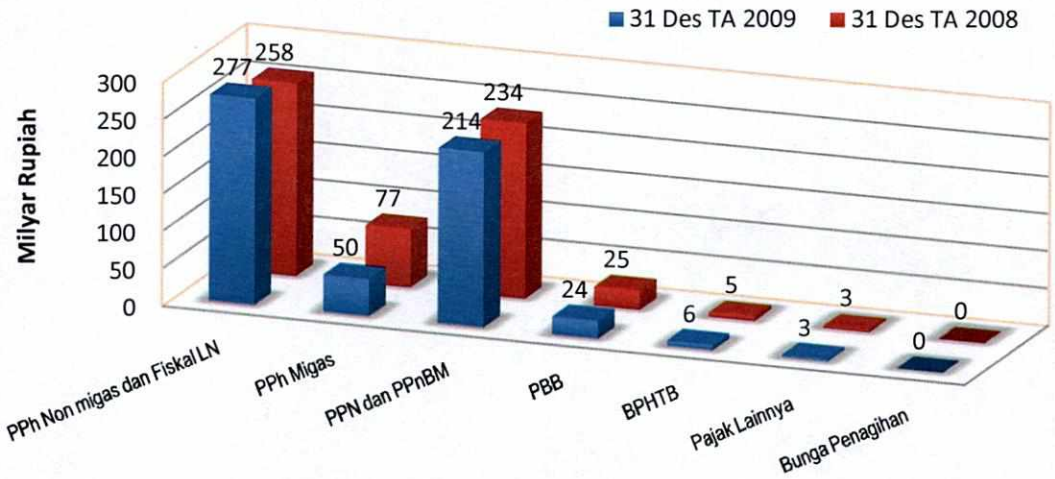
No	Jenis Penerimaan	Estimasi Pendapatan	Realisasi Bruto	(%)
1	Penerimaan Pajak	577.386.684.000.000	575.432.696.759.361	99.66
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.049.361.176	8.909.771.027	176.45
TOTAL		**577.391.733.361.176**	**575.441.606.530.388**	**99.66**

Perbandingan realisasi Penerimaan Dalam Negeri TA 2009 dan 2008 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2.c berikut:

Tabel IV.B.2.1.2.c.
Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Brutto
Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-09	31-Des-08	% Naik/ (Turun)
PPh Nonmigas dan Fiskal LN	277.373.618.998.130	258.044.703.433.389	7,49
PPh Migas	50.043.710.921.456	77.116.355.457.688	(35,11)
PPN dan PPn BM	214.149.813.205.623	234.496.062.869.753	(8.68)
PBB	24.206.935.651.561	25.187.911.614.788	(3,89)
BPHTB	6.482.715.490.740	5.475.437.607.281	18,40
Pajak Lainnya	3.037.040.812.167	2.830.249.777.403	7,31
Bunga Penagihan	138.861.679.684	218.065.162.438	(36,32)
Total	**575.432.696.759.361**	**603.368.785.922.740**	(4.63)

Grafik IV.B.2.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Brutto
Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam trilliun rupiah)



B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

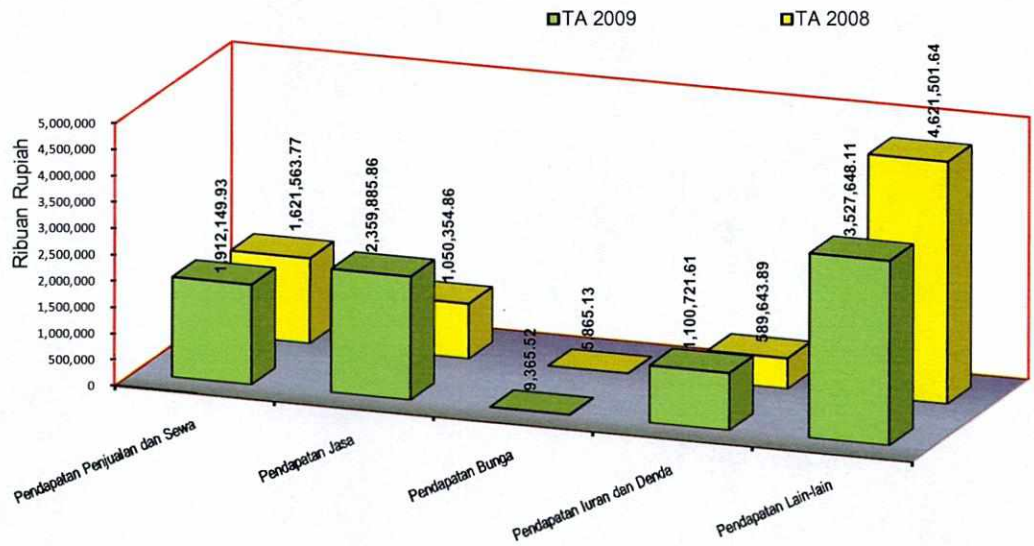
Realisasi PNBP

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto TA 2009 adalah sebesar Rp8.909.771.027,00 atau 176,45 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.049.361.176,00. Hal ini berarti PNBP Tahunan TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp1.020.841.728,00 atau 12,94 persen dari realisasi TA 2008. Besarnya realisasi PNBP TA 2009 dan TA 2008 adalah sebagaimana Tabel IV. B.2.1.3. berikut:

Tabel IV.B.2.1.3.
Penerimaan Bukan Pajak Brutto TA 2009 dan TA 2008
(dalam rupiah)

Jenis Penerimaan	2009	2008	% Naik (Turun)
PNBP Pendapatan Penjualan dan Sewa	1.912.149.926	1.621.563.774	17,92
PNBP Pendapatan Jasa	2.359.885.864	1.050.354.862	124,68
PNBP Pendapatan Bunga	9.365.521	5.865.129	59,68
PNBP Pendapatan Iuran dan Denda	1.100.721.605	589.643.893	86,68
PNBP Pendapatan Lain-lain	3.527.648.111	4.621.501.641	(23,67)
Total PNBP	**8.909.771.027**	**7.888.929.299**	12,94

Grafik IV.B.2.1.3.
Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam ribuan rupiah)



Realisasi PNBP Lainnya

B.2.1.4. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Dalam Tahun Anggaran 2009 dan 2008, Direktorat Jenderal Pajak tidak membukukan realisasi PNBP Lainnya.

Pengembalian Pendapatan

B.2.1.5. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2009 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp30.770.706.082.600,00 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2008 mengalami penurunan sebesar Rp1.590.831.935.190,00 atau sebesar 4,92 persen.

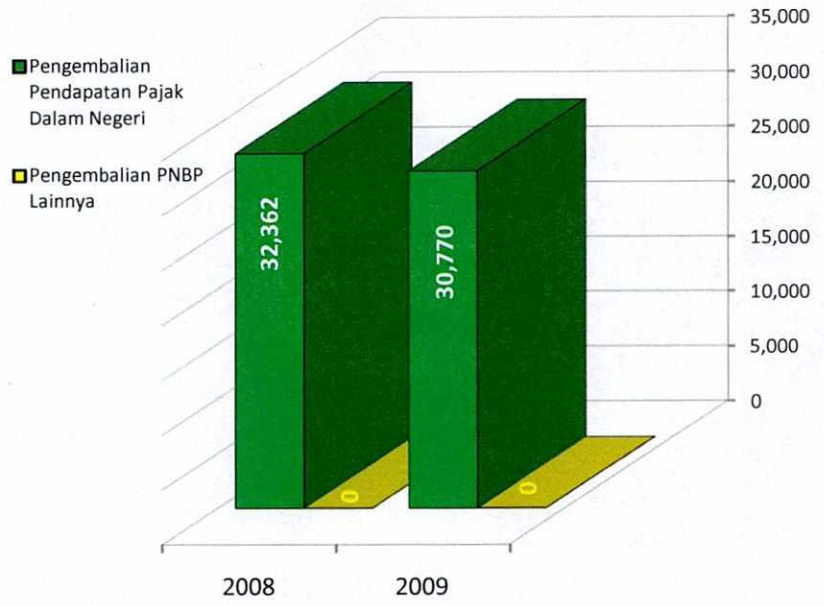
Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang *(recurring)*, maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D).
Direktorat Jenderal Pajak mengakui dua jenis pengembalian pendapatan negara dan hibah, yaitu pengembalian pendapatan pajak dalam negeri dan pengembalian PNBP lainnya. Pengembalian pendapatan per jenis penerimaan sebagaimana Tabel IV.B.2.1.5. berikut:

Tabel IV.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
T.A 2009 dan T.A 2008
(dalam rupiah)

Jenis Pengembalian	T. A 2009	T. A 2008
Pendapatan Pajak dalam Negeri		
PPh Migas	5.216.464.600	282.320.514
PPh Non Migas	9.734.379.192.746	8.087.990.449.533
PPh Fiskal Luar Negeri	85.000.000	755.239.711
PPN	20.707.667.865.893	23.966.079.631.284
PPnBM	246.159.979.413	277.138.446.870
PBB	3.403.494.977	3.590.270.585
BPHTB	13.585.638.085	10.594.642.483
Pajak Lainnya	42.507.600	9.300.000
Bunga Penagihan Pajak	59.848.446.886	15.097.716.810
Pengembalian PNBP	**0**	**0**
Pendapatan Penjualan dan Sewa	0	0
Pendapatan Jasa II	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Total Pengembalian	**30.770.706.082.600**	**32.361.538.017.790**

Grafik IV.B.2.1.5.
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
T.A 2009 dan T.A 2008
(dalam milyar rupiah)



Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data pengembalian pendapatan pajak dilakukan rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak antara Dirktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan (mencocokan) data transaksi pengembalian pendapatan berupa daftar SP2D pengembalian pajak antara data SAU dengan data SAI. Rincian pengembalian berdasarkan jenis pajak adalah sebagai berikut:

AKUN	JENIS PAJAK	SAU	SAI	SELISIH
411111	PPh Minyak Bumi	0	5.216.464.600	(5.216.464.600)
411121	PPh Pasal 21	37.251.319.300	35.994.347.177	1.256.972.123
411122	PPh Pasal 22	5.647.652.850	3.537.810.611	2.109.842.239
411123	PPh Pasal 22 Impor	15.777.950.387	15.588.583.747	189.366.640
411124	PPh Pasal 23	405.533.269.228	404.850.375.381	682.893.847
411125	PPh Pasal 25/29 OP	17.303.281.503	19.261.621.069	(1.958.339.566)
411126	PPh Pasal 25/29 Badan	8.843.570.524.890	8.838.145.734.432	5.424.790.458
411127	PPh Pasal 26	345.262.881.444	344.976.638.089	286.243.355
411128	PPh Final dan FLN	72.502.313.772	72.335.822.553	166.491.219
411129	PPh Non Migas Lainnya	48.259.687	48.259.687	0
411131	PPh Fiskal	85.000.000	85.000.000	0
411211	PPN Dalam Negeri	20.630.128.807.910	20.625.582.962.671	4.545.845.239
411212	PPN Impor	66.903.914.111	67.760.184.118	(856.270.007)
411219	PPN Lainnya	14.324.719.104	14.324.719.104	0
411221	PPnBM Dalam Negeri	231.211.472.392	231.961.577.895	(750.105.503)

411222	PPnBM Impor	14.867.626.200	13.790.896.093	1.076.730.107
411229	PPnBM Lainnya	407.505.425	407.505.425	0
411311	PBB Perdesaan	303.924.439	136.133.723	167.790.716
411312	PBB Perkotaan	754.086.985	654.083.274	100.003.711
411313	PBB Perkebunan	2.614.512.404	2.612.798.736	1.713.668
411315	PBB Pertambangan	0	479.244	(479.244)
411411	BPHTB	13.658.745.546	13.585.638.085	73.107.461
411611	Pendapatan Bea Materai	30.300.000	250.000	30.050.000
411612	Pend. Penj. Benda Materai	22.650.000	12.150.000	10.500.000
411619	PTLL	30.107.600	30.107.600	-
411621	Bunga Penagihan PPh	53.671.454.801	53.881.196.931	(209.742.130)
411622	Bunga Penagihan PPN	6.135.396.245	5.882.144.957	253.251.288
411624	Bunga Penagihan PTLL	0	42.597.398	(42.597.398)
JUMLAH		30.778.047.676.223	30.770.706.082.600	7.341.593.623

Hasil rekonsiliasi data pengembalian pendapatan yang dilakukan dengan membandingkan data SP2D atas transaksi pengembalian pendapatan, secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	TR	SAU	SAI
SP2D ada dengan MAK, Nomor dan Nominal sama	15.602	30.666.906.146.180	30.666.905.900.180
SP2D ada dengan Nomor dan Nominal sama, tetapi MAK Berbeda	59	103.506.637.139	103.506.637.139
SP2D hanya ada di SAI	4	0	238.868.293
SP2D hanya ada di SAU (SPM-PP)	348	7.634.892.904	0
JUMLAH	16.013	30.778.047.676.223	30.770.651.405.612

Perbedaan-perbedaan berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- perbedaan empat lembar SP2D hanya ada di SAI sebesar Rp 238.868.239,00 berdasarkan hasil klasirifikasi kepada satuan kerja terkait diakui dan dinyatakan ada, sehingga terhadap data tersebut tetap dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan;
- selanjutnya 238 lembar SP2D hanya ada di SAU sebesar Rp7.634.892.904 juga telah dilakukan klarifikasi ke satuan kerja terkait, SP2D tersebut tidak diakui oleh satun kerja terkait dan merupakan SPM-PP.
- perbedaan sebesar Rp54.676.988,00 merupakan selisih antara jumlah total SP2D dalam Berita Acara Pengembalian Pendapatan sebesar Rp30.770.651.405.612,00 dengan Realisasi pengembalian pendapatan (LRA) sebesar Rp30.770.706.082.600,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	BAR Pengembalian Pendapatan - SAI	Rp	30.770.651.405.612
2.	Terjadi double entry (2 SP2D)	Rp	(4.027.456)
3.	Salah penyajian jawaban klarifikasi SP2D Pengembalian Pendapatan (2 SP2D)	Rp	58.704.444
4.	LRA Pengembalian Pendapatan	Rp	30.770.706.082.600

Sengketa atas Pengembalian Pendapatan

Nilai pengembalian pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2009 sebesar Rp30.770.706.082.600,00 dan per 31 Desember 2008 sebesar Rp32.361.538.017.790,00 serta pengembalian pendapatan periode-periode sebelumnya merupakan produk dari surat ketetapan pajak lebih bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nominal surat ketetapan pajak lebih bayar yang diajukan keberatan, banding/gugatan dan peninjauan kembali yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah Rp3.364.758.944.140,00 dan U$D93.596.309,00.

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara

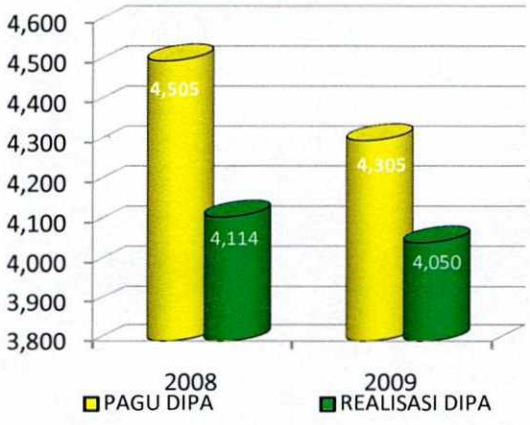
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran bunga utang. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan Unit Kantor Wilayah, fungsi, jenis belanja dan jenis Satuan kerja.

B.2.2.1. Belanja

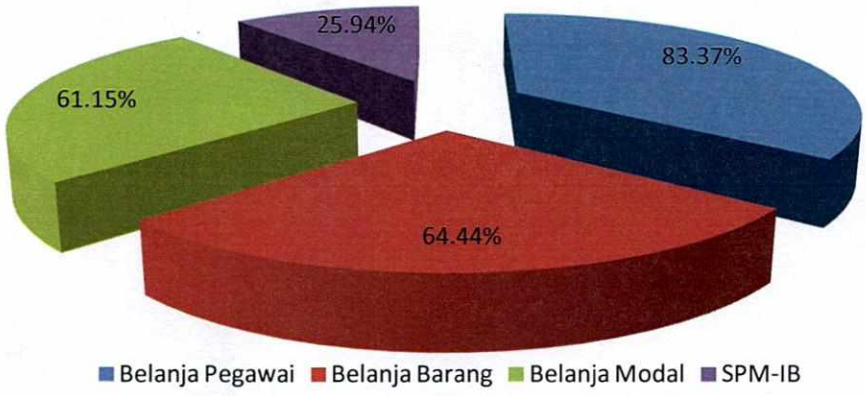
Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahunan TA 2009 dengan memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga adalah sebesar Rp4.049.869.635.177,00 atau 94,07 Persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp4.305.217.063.000,00. Realisasi belanja Tahunan TA 2009 mengalami penurunan sebesar Rp64.166.589.697,00 atau 1,56 Persen dari realisasi belanja pada TA 2008 sebesar Rp4.114.036.224.874,00. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya pengeluaran untuk belanja barang dan modal. Perbandingan antara realisasi belanja dengan pagu DIPA Tahunan TA 2009 dan 2008 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.1.a dan IV.B.2.2.1.b berikut:

Grafik IV.B.2.2.1.a
Perbandingan Realisasi Belanja Brutto dengan Pagu DIPA
Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam milyar rupiah)



Grafik IV.B.2.2.1.b
Komposisi Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009



Perbandingan realisasi belanja dengan DIPA TA 2008 menurut sumber dana dapat dilihat pada tabel IV.B.2.2.1. berikut.

Tabel IV.B.2.2.1.a
Perbandingan Realisasi Belanja Brutto dengan Pagu DIPA
Menurut Sumber Dana
Tahun Anggaran 2009
(*dalam rupiah*)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	4.277.178.983.000	4.049.869.635.177	94,07%
Pinjaman Luar Negeri	4.294.000.000	0	0,00%
Hibah Luar Negeri	21.744.080.000	0	0,00%
Rupiah Murni Pendamping	2.000.000.000	0	0,00%
Total	**4.305.217.063.000**	**4.049.869.635.177**	**94,07%**

Perbandingan antara realisasi belanja TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel 24 dan grafik 12 berikut.

Tabel IV.B.2.2.1.b
Perbandingan Realisasi Belanja Brutto Kementerian Keuangan
Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(*dalam rupiah*)

Uraian	TA 2009	TA 2008	Kenaikan/ Penurunan	%
Rupiah Murni	4.049.869.635.177	4.114.036.224.874	(64.166.589.697)	(1.56)%
Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00%
Hibah Luar Negeri	0	0	0	0,00%
Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	0,00%
Total	**4.049.869.635.177**	**4.114.036.224.874**	**(64.166.589.697)**	**(1.56)%**

Rekonsiliasi Belanja

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi belanja telah dilakukan rekonsiliasi data belanja antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan secara elektronis di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut:

- Rekonsiliasi Realisasi Belanja

1.	Realisasi Belanja Menurut SAU	Rp	4.049.869.635.159
2.	Realisasi Belanja Menurut SAI	Rp	4.049.867.276.177
	Selisih	**Rp**	**2.358.982**

- Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja

1.	Realisasi Pengembalian Belanja Menurut SAU	Rp	3.113.657.473
2.	Realisasi BelanjaPengembalian Menurut SAI	Rp	1.569.595.193
	Selisih	Rp	1.544.062.280

Berkenaan dengan hasil rekonsiliasi tersebut dilakukan penelitian yaitu dengan mencocokan nilai nominal dan nomor SP2D dengan *copy* BAR dari masing-masing satuan kerja terkait. Secara garis besar hasil penelitian tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	SAU	SAI
- SP2D Nilai dan Nomor Sama	4.049.867.276.177	4.049.867.276.177
- SP2D Hanya Ada di SAU	2.358.982	
JUMLAH	4.049.869.635.159	4.049.867.276.177

Selanjutnya, terhadap data SP2D dengan nomor SP2D sama dan nominal berbeda ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada seluruh satuan kerja terkait. Sehingga nilai realisasi belanja dengan memperhitungkan koreksi berdasarkan jawaban klarifikasi adalah sebagai berikut:

Uraian	SAU	SAI
SP2D Sama	4.049.867.276.177	4.049.867.276.177
Koreksi:		
- SP2D Hanya Ada di SAU	2.358.982	0
- SP2D Belum Rekam	0	2.358.982
JUMLAH REALISASI BELANJA	4.049.869.635.159	4.049.869.635.159

SP2D sebesar Rp2.358.982 tersebut terdiri dari satu SP2D Nomor 176498M dan ada di KPP Pratama Kupang. Data tersebut telah ada di BAR satker dengan keterangan "sama", namun data tersebut hilang saat kompilasi ADK *(upload)* di tingkat Kantor Wilayah DJP Nusatenggara.

Rekonsiliasi Pengembalian Belanja

Berkenaan dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.569.595.193 dapat dijelaskan bahwa pengembalian belanja sebesar Rp1.556.941.336 merupakan pengembalian TKPKN yang dilakukan oleh satker DJP tetapi atas nama satker Setjen Departemen Keuangan dan pengembalian belanja atas belanja yang dibiayai dari BPPBB. Sedangkan Pengembalian Belanja Hanya tercatat di SAI sebesar Rp12.879.056,00 tersebut berdasarkan jawaban surat klarifikasi kepada

satuan kerja dinyatakan ada dan diakui. Sehingga, jumlah pengembalian belanja menjadi sebagai berikut:

		SAU	SAI
1	Data Pengembalian Belanja Awal	Rp 3.113.657.473	Rp 1.569.595.193
2	Pengembalian Bukan Satker 1504 DJP	Rp (1.556.941.336)	Rp 0
3	Pengembalian Belanja Hanya tercatat di SAI	Rp 12.879.056	Rp 0
4	Data Pengembalian Belanja Akhir	Rp 1.569.595.193	Rp 1.569.595.193

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Kanwil DJP

Realisasi Belanja per Kantor Wilayah

Realisasi Belanja Brutto Direktorat Jenderal Pajak TA 2009 tanpa Imbalan Bunga adalah sebesar Rp2.992.776.205.897,00, sedangkan Realisasi Belanja Brutto termasuk Imbalan Bunga adalah Rp4.049.869.635.177,00. Jumlah tersebut dapat dirinci menurut Kantor Wilayah sebagaimana Tabel IV.B.2.2.2. berikut:

Tabel IV.B.2.2.2.
Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Instansi Pusat	1.781.510.423.000	946.097.269.820	53,10
2	Kanwil DJP Nangroe Aceh Darussalam	43.735.598.000	35.490.058.215	81,14
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	89.131.886.000	84.954.513.647	95,31
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	79.051.929.000	54.757.790.805	69,26
5	Kanwil DJP Riau Dan Kep. Riau	78.081.641.000	88.223.139.381	100,00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat Dan Jambi	70.430.775.000	62.290.970.252	88,44
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kep. Bangka Belitung	78.505.071.000	61.443.739.203	78,26
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	82.681.370.000	65.215.093.024	78,87
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	114.300.406.000	139.901.633.201	100,00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	69.932.733.000	69.760.269.625	99,75
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	88.416.151.000	151.728.949.910	100,00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	72.882.381.000	79.769.460.629	100,00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	58.918.588.000	69.095.517.188	100,00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	73.588.730.000	461.135.949.439	100,00
15	Kanwil DJP Banten	56.862.299.000	69.342.614.701	100,00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	111.198.184.000	100.430.243.828	90,31
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	131.909.083.000	113.619.545.055	86,13

18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	124.925.927.000	102.388.678.663	81,95
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	92.479.961.000	84.149.581.884	90,99
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	44.580.814.000	39.346.201.796	88,25
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	78.769.134.000	82.872.307.537	100,00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	117.985.285.000	96.766.820.119	82,01
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	105.788.733.000	100.225.910.490	94,74
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	35.086.220.000	28.338.756.090	80,76
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	75.111.881.000	47.340.389.844	63,02
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	87.333.629.000	47.622.993.407	54,53
27	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat Dan Tenggara	154.826.757.000	134.988.646.069	87,18
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo Dan Maluku Utara	78.119.177.000	70.885.613.500	90,74
29	Kanwil DJP Bali	50.757.039.000	46.254.552.695	91,12
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	79.660.697.000	58.278.070.738	73,15
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	68.850.773.000	63.577.878.985	92,26
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	29.747.885.000	393.576.475.437	100,00
	TOTAL	**4.305.217.063.000**	**4.049.869.635.177**	94,07

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi

Realisasi belanja menurut fungsi

Berdasarkan fungsi sebagaimana DIPA yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan pelaksanaan fungsi Pelayanan Umum dalam penyelenggaraan kepemerintahan. Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak menurut Fungsi TA 2009 adalah sebagaimana Table IV.B.2.2.3.a. berikut:

Tabel IV.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Brutto Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi
Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2009
01	Pelayanan Umum	4.049.869.635.177
02	Pertahanan	0
03	Ketertiban dan Keamanan	0
04	Ekonomi	0
05	Lingkungan Hidup	0
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	0
07	Kesehatan	0
08	Pariwisata dan Budaya	0
09	Agama	0
10	Pendidikan	0
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	0
Total		**4.049.869.635.177**

Sedangkan perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dapat ditunjukan sebagaimana Tabel IV.B.2.2.3.b. berikut:

Tabel IV.B.2.2.3.b.
Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi
Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2009	TA 2008
01	Pelayanan Umum	4.049.869.635.177	4.114.036.224.874
02	Pertahanan	**0**	**0**
03	Ketertiban dan Keamanan	0	0
04	Ekonomi	0	0
05	Lingkungan Hidup	0	0
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	0	0
07	Kesehatan	0	0
08	Pariwisata dan Budaya	0	0
09	Agama	0	0
10	Pendidikan	0	0
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	0	0
	Total	**4.049.869.635.177**	**4.114.036.224.874**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak Tahunan TA 2009 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp4.049.869.635.177,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,26 persen dari tahun sebelumnya.

B.2.2.4. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja per jenis belanja

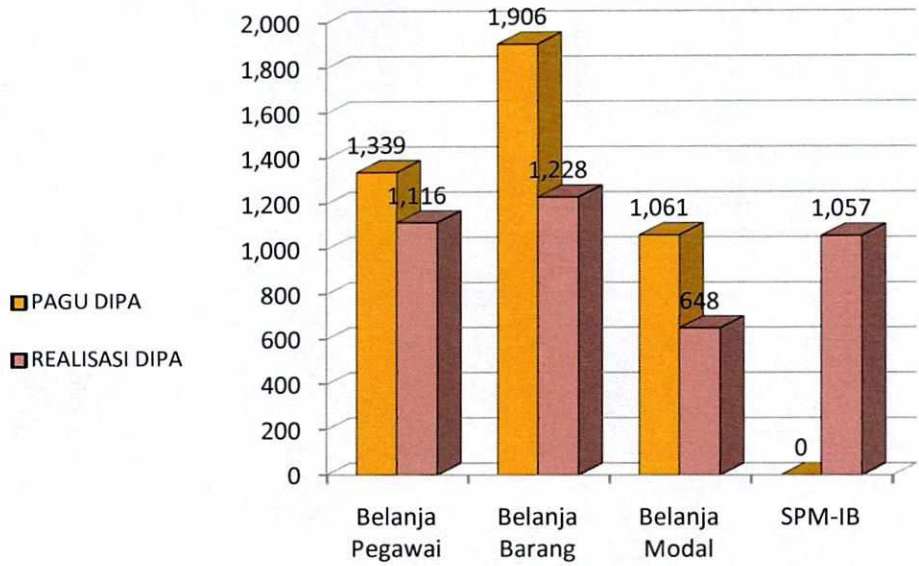
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; dan Pembayaran Bunga Utang. Komposisi realisasi Belanja tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel IV.B.2.2.4. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Brutto Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	(%)
1.	Belanja Pegawai	1.338.853.128.000	1.116.236.032.958	83,37
2.	Belanja Barang	1.905.810.437.000	1.228.057.182.349	64,44
3.	Belanja Modal	1.060.553.498.000	648.482.990.590	61,15
4.	**Jumlah (1 + 2 + 3)**	**4.305.217.063.000**	**2.992.776.205.897**	**69,52**
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1.057.093.429.280	0
6.	**Jumlah (4 + 5)**	**4.305.217.063.000**	**4.049.869.635.177**	**94,07**

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahunan TA 2009 sebagaimana Grafik IV.B.2.2.4. berikut:

Grafik IV.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009
(dalam milyar rupiah)



Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Bruto Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp1.116.236.032.958,00 yang berarti 83,37 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahunan TA 2009 sebesar Rp1.338.853.128.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp110.732.838.447,00 atau 11,01 persen dari TA 2008. Rincian Belanja Pegawai Tahunan TA 2009 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.a. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.a
Realisasi Belanja Pegawai Brutto Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-09	31-Des-08	% Naik / (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.103.779.394.230	978.044.563.311	13,73
Belanja Honorarium	0	19,934,445,000	(100,00)
Belanja Lembur	12.450.331.721	7.524.186.200	66,47
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0,00
Belanja Tunjangan Khusus	6.307.007	0	0,00
Belanja Vakasi	0	0	0,00
Total	**1.116.236.032.958**	**1.005.503.194.511**	**11,01**

Belanja Barang

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Bruto Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp1.228.057.182.349,00 yang berarti 64,44 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahunan TA 2009 sebesar Rp1.905.810.437.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp280.600.489.518,00 atau 29,62 persen dari Tahunan TA 2008. Rincian Belanja Barang Tahunan TA 2009 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.b. dan Tabel IV.B.2.2.4.c. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.b
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	1.024.900.235.000	702.149.018.533	68,51
Belanja Barang Non Operasional	6.018.900.000	3.194.104.941	53,07
Belanja Jasa	384.409.318.000	179.459.790.830	46,68
Belanja Pemeliharaan	265.198.567.000	192.746.013.746	72,68
Belanja Perjalanan	225.283.417.000	150.508.254.299	68.60
Jumlah	**1.905.810.437.000**	**1.228.057.182.349**	**64,44**

Tabel IV.B.2.2.4.c
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	2009	2008	% Naik / (Turun
Belanja Barang Operasional	702.149.018.533	507.688.690.208	39,05
Belanja Barang Non Operasional	3.194.104.941	41.376.646.465	(92,09)
Belanja Jasa	179.459.790.830	134.446.626.515	34,14
Belanja Pemeliharaan	192.746.013.746	139.869.619.830	38,68
Belanja Perjalanan	150.508.254.299	124.075.109.813	21,65
Jumlah	**1.228.057.182.349**	**947.456.692.831**	**30,29**

Belanja Modal

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2009 adalah sebesar Rp648.482.990.590,00 yang berarti 61,15 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahunan TA 2009 sebesar Rp1.060.553.498.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2009 mengalami penurunan sebesar Rp606.275.827.007,00 atau 48.32 Persen dari Tahunan TA 2008. Rincian Belanja Modal Tahunan TA 2009 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.4.d. dan Tabel IV.B.2.2.4.e. berikut:

Tabel IV.B.2.2.4.d
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	5.400.000.000	1.656.820.500	30,68
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.829.837.000	215.385.671.566	64,32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	454.057.437.000	349.289.453.983	76,93
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	88.505.246.000	13.788.859.982	15,57
Belanja Modal Fisik Lainnya	177.760.978.000	68.362.184.559	38,46
Jumlah	**1.060.553.498.000**	**648.482.990.590**	**61,15**

Tabel IV.B.2.2.4.e
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	% Naik/ (Turun)
Belanja Modal Tanah	1.656.820.500	5.542.681.800	(70,11)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.385.671.566	618.501.968.728	(65,18)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.289.453.983	533.220.314.992	(34,49)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	13.788.859.982	23.587.558.004	(41,54)
Belanja Modal Fisik Lainnya	68.362.184.559	73.906.294.073	(7,50)
Jumlah	**648.482.990.590**	**1.254.758.817.597**	**(48,32)**

B.2.2.5. Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Brutto Tahunan TA 2009 adalah sebesar Rp1.057.093.429.280,00 yang merupakan imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahunan TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp150.775.909.345,00 atau 16.64 persen apabila dibandingkan pengeluaran yang sama untuk Tahunan TA 2008. Realisasi Pembayaran Bunga Utang tersebut Tabel IV.B.2.2.5. berikut:

Tabel IV.B.2.2.5.
Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Bruto TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Pembayaran Bunga Utang	31 Des TA 2009	31 Des TA 2008
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	1.057.093.429.280	906.317.519.935
Total	**1.057.093.429.280**	**906.317.519.935**

B.2.2.6. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Satuan Kerja

Realisasi Belanja Menurut Jenis Satuan Kerja

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari *(i)* Satker Pusat dan *(ii)* Satker Daerah. Dilihat dari komposisinya, realisasi Satker Daerah Tahunan TA 2009 menempati porsi terbesar, yaitu Rp 3.103.826.061.373,00 atau 76.63 persen dari total Belanja Direktorat Jenderal Pajak. Komposisi realisasi Belanja per jenis satuan kerja pada Tahunan TA 2009 sebagaimana Tabel IV.B.2.2.6. berikut:

Tabel IV.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Per Jenis Satuan Kerja Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Satuan Kerja Pusat	1.781.510.423.000	946.097.269.820	53,11
Satuan Kerja Daerah	2.523.706.640.000	3.103.772.365.357	122,98
Jumlah	**4.305.217.063.000**	**4.049.869.635.177**	**94,07**

B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahunan TA 2009 adalah sebesar Rp1.569.595.193,00 atau naik sebesar 97,11% dari tahun sebelumnya sebesar Rp796.297.189,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel IV.B.2.2.7. berikut:

Tabel IV.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2009
(dalam rupiah)

Jenis Belanja	TA 2009	TA 2008	% Naik / (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	1.092.654.533	606.704.317	80,10
Pengembalian Belanja Barang	169.407.781	154.715.806	9,50
Pengembalian Belanja Modal	21.434.000	6.520.700	228,71
Pengembalian Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	286.098.879	28.356.366	908,94
TOTAL	**1.569.595.193**	**796.297.189**	**97,11**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan Penting Lainnya

Dalam DIPA TA 2009 Direktorat Jenderal Pajak, terdapat kegiatan PINTAR sebesar Rp. 6.294.000.000 2009 yang bersumber dari pinjaman luar negeri *(loan)* senilai USD 452.000,- atau setara dengan Rp. 4.294.000.000,00 (kurs rupiah 1 USD = 9.500 IDR) berikut Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Kegiatan PINTAR tersebut ditunda pelaksanaannya (diberi tanda bintang) dengan alasan pentahapan untuk kegiatan dimaksud di direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 mendatang.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2009 sebagaimana Tabel IV.C.1 berikut :

Tabel IV.C.1
Neraca Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 *Audited*
(dalam rupiah)

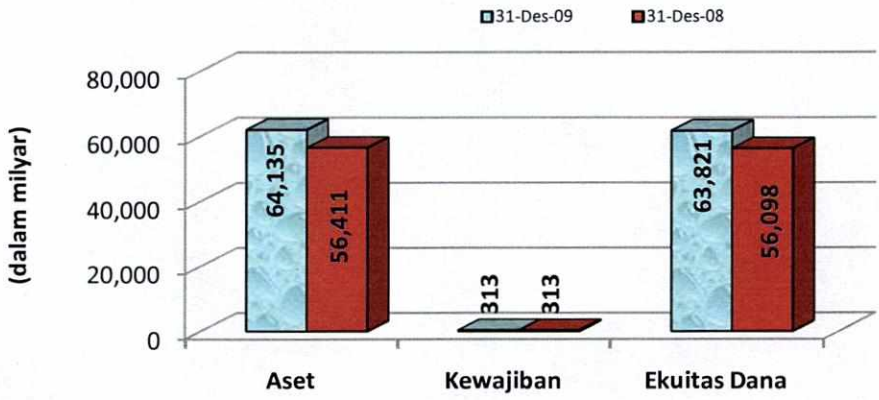
Uraian	31 Des 2009	31 Des 2008	Kenaikan / (penurunan)
Aset	64.135.829.528.130	56.411.609.187.631	13,69%
Kewajiban	313.968.188.842	313.267.702.980	0,22%
Ekuitas Dana	63.821.861.339.288	56.098.341.484.651	13,76%

Jumlah Aset per 31 Desember 2009 sebesar Rp64.135.829.528.130,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp50.146.014.666.767,00, Aset Tetap sebesar Rp13.731.730.350.246,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp258.084.511.116,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp313.968.188.842,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp313.968.188.842,00. Sedangkan jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2009 sebesar Rp63.821.861.339.288,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp49.832.046.477.925,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp13.989.814.861.362,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2009 per 31 Desember 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp7.724.220.340.498,00 dari jumlah aset per 31 Desember 2008 *audited* sebesar Rp56.411.609.187.631,00. Kenaikan tersebut didukung oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp700.485.862,00 dan kenaikan Ekuitas Dana sebesar Rp7.723.519.854.636,00 . Grafik komposisi neraca sebagaimana Grafik IV.C.1 berikut:

Grafik IV.C.1
Komposisi Neraca Per 31 Desember 2009
(dalam milyar rupiah)



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

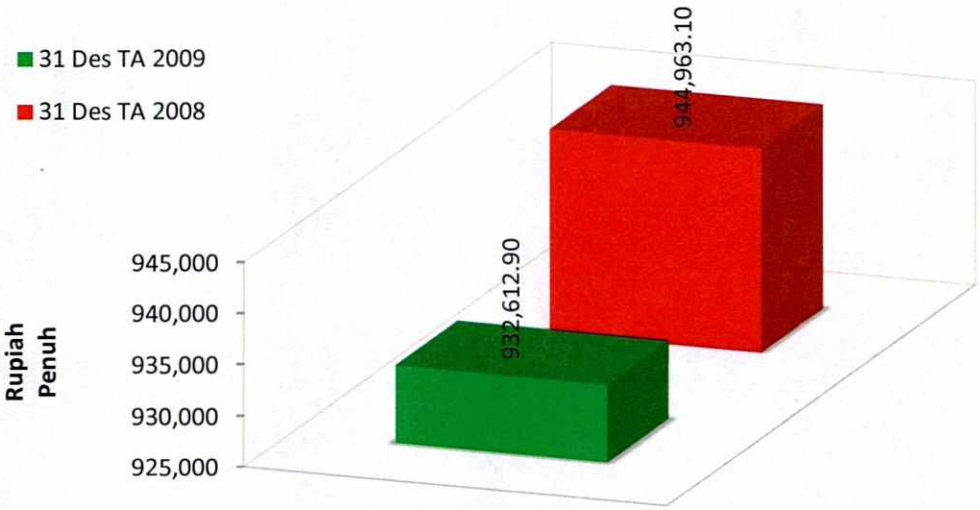
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar Rp932.612.895,00. Saldo tersebut merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran ke kas negara sampai dengan tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per wilayah sebagaimana Tabel IV.C.2.1.1. berikut:

Tabel IV.C.2.1.1.
Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Wilayah	31-12-09	31-12-08	Naik / (Turun)
0	Instansi Pusat	0	0	0,00
10	Kantor Wilayah DJP Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	0	384,614	(100,00)
20	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I di Medan	179.504.791	56.664.985	216,78
30	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II di Pematang Siantar	127.177.285	61.381.338	107,19
40	Kantor Wilayah DJP Riau Dan Kepulauan Riau di Pekanbaru	49.728.184	91.560.997	(45,69)
50	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi di Padang	1.773.354	10.394.068	(82,94)
60	Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	0	42.896.447	(100,00)
70	Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung di Bandar Lampung	40.340.423	7.182.391	461,66
80	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat di Jakarta	13.700.000	0	100,00
90	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat di Jakarta	1.408.000	2.062.790	(31,74)
100	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan di Jakarta	9.350.000	0	100,00
110	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur di Jakarta	0	98.652	(100,00)
120	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara di Jakarta	0	1.800.000	(100,00)
130	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus di Jakarta	0	8.412.744	(100,00)
140	Kantor Wilayah DJP Banten di Serang	1.928.723	494.023	290,41
150	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung	98.514.374	4.148.910	2.274,46
160	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II di Bekasi	42.592.984	53.281.366	(20,06)
170	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I di Semarang	0	2.250.000	(100,00)
180	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II di Surakarata	0	38.903.415	(100,00)
190	Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	0	0	0,00
200	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I di Surabaya	0	14.844.800	(100,00)
210	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II di Sidoarjo	0	34.988.927	(62,06)
220	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di Malang	1.480.000	144.784.827	(98,77)
230	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat di Pontianak	17.459.012	0	100,00

240	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28.340.508	74.871.788	(62,15)
250	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur di Balikpapan	4.571.216	63.820.988	(92,84)
260	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara di Makassar	60.856.366	66.001.209	(7,80)
270	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara di Manado	11.917.659	9.958.013	19,68
280	Kantor Wilayah DJP Bali di Denpasar	0	0	0,00
290	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara di Mataram	213.926.991	143.696.137	48,87
300	Kantor Wilayah DJP Papua Dan Maluku di Jayapura	28.043.025	10.079.666	178,21
310	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar di Jakarta	0	0	0,00
	Jumlah	**932.612.895**	**944.963.095**	(1,31)

Grafik IV.C.2.1.1.
Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)



C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2008 *audited* Rp0,00. Sedangkan jumlah per 31 Desember 2009 sebesar Rp6.546.697,00 merupakan bunga atas jasa giro yang terdapat di beberapa satuan kerja:

Tabel IV.C.2.1.2.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Rupiah
663541	KPP Pratama Cilegon	679,00
561356	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	10,769,00
569205	KP2KP Lumajang	11,793,00

410078	KPP Penanaman Modal Asing Satu	364,199,00
561335	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	465,257,00
449777	KPP Madya Jakarta Selatan	1,101,750,00
655480	KANWIL DJP JAKARTA UTARA	1,172,250,00
635816	KPP Pratama Surabaya Simokerto	1,605,000,00
560880	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	1,815,000,00
Jumlah		6,546,697,00

C.2.1.3. Kas Di Bendahara Penerimaan

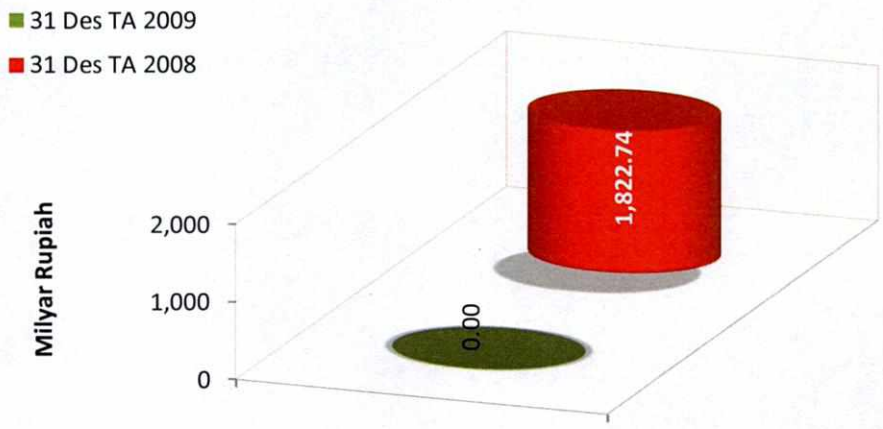
Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp0,00. Sedangkan jumlah per 31 Desember 2008 *audited* Rp1.822.735,00 sehingga mengalami penurunan sebesar jumlah tersebut.

Tabel IV.C.2.1.3.
Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Akun	31-Des-09	31-Des-08	Naik / (Turun)
Kas Di Bendahara Penerimaan	0	1.822.735	(100%)

Grafik IV.C.2.1.3.
Kas Di Bendahara Penerimaan 31 Desember TA 2009
(dalam rupiah)



C.2.1.4. Piutang Pajak

Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2009 sebesar Rp 49.999.727.823.996,00. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2009 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan Kantor Wilayah, berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan umur piutang pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.4.a., Tabel IV.C.2.1.4.b., dan Tabel IV.C.2.1.4.c. berikut:

Tabel IV.C.2.1.4.a
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil DJP Per 31 Desember TA 2009
(dalam rupiah)

KODE KANWIL	NAMA KANWIL	JUMLAH
010	KANWIL DJP NAD	282,045,810,848
020	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	1,232,620,327,607
030	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	245,686,808,679
040	KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	1,589,926,555,208
050	KANWIL DJP SUMBAR DAN JAMBI	444,913,485,749
060	KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP BABEL	742,937,663,955
070	KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	423,760,377,986
080	KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	4,874,035,504,234
090	KANWIL DJP JAKARTA BARAT	1,423,365,298,587
100	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	4,667,275,122,989
110	KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	1,404,079,529,000
120	KANWIL DJP JAKARTA UTARA	3,177,898,000,645
130	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	6,209,721,707,347
140	KANWIL DJP BANTEN	1,005,226,710,111
150	KANWIL DJP JAWA BARAT I	2,027,218,054,789
160	KANWIL DJP JAWA BARAT II	1,707,739,644,041
170	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	935,427,222,905
180	KANWIL DJP JAWA TENGAH II	465,982,021,830
190	KANWIL DJP DIY	211,765,100,154
200	KANWIL DJP JAWA TIMUR I	1,185,289,394,778
210	KANWIL DJP JAWA TIMUR II	628,692,123,266
220	KANWIL DJP JAWA TIMUR III	560,352,729,000
230	KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	297,671,993,202
240	KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	609,823,214,316
250	KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR	1,211,638,395,473
260	KANWIL DJP SULAWESI SELATAN BARAT & TENGGARA	513,924,017,617
270	KANWIL DJP SULAWESI UTARA,TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA	346,927,938,187
280	KANWIL DJP BALI	621,437,072,269
290	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	251,132,845,625
300	KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU	606,265,881,000
310	KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR	10,094,947,272,600
TOTAL		**49.999.727.823.996**

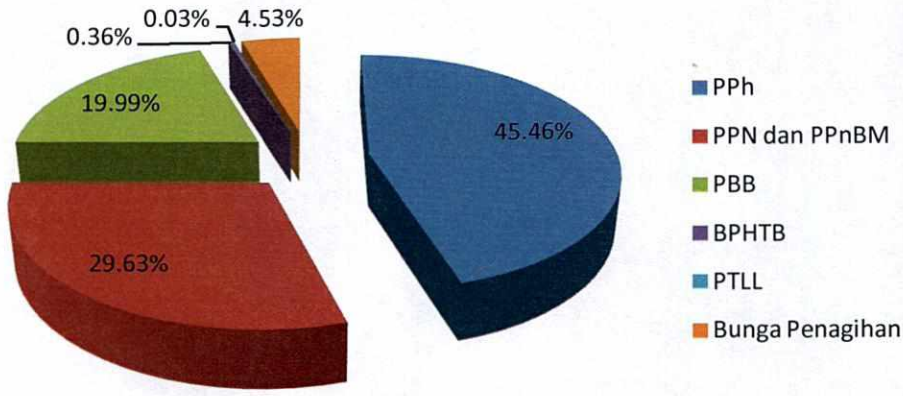
Tabel IV.C.2.1.4.b
Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Des 2009 dan 31 Des 2008
(dalam rupiah)

JENIS PIUTANG	12/31/2009	12/31/2008	Naik / Turun (%)
PIUTANG PPH PASAL 21	951,534,554,486	1,229,968,846,711	-22.64%
PIUTANG PPH PASAL 22	489,840,716,689	104,120,004,440	370.46%
PIUTANG PPH PASAL 23	1,688,528,889,756	3,054,716,319,783	-44.72%
PIUTANG PPH PASAL 25 OP	1,053,689,834,132	1,006,960,630,021	4.64%
PIUTANG PPH PASAL 25 BADAN	16,424,024,121,140	16,268,284,571,207	0.96%
PIUTANG PPH PASAL 26	1,586,493,805,101	125,143,589,474	1167.74%
PIUTANG PPH FINAL dan FISKAL LN	535,862,689,996	922,916,307,676	-41.94%
PIUTANG PPH NON MIGAS LAINNYA	0	95,145,000	-100.00%
PIUTANG PPN DALAM NEGERI	14,533,638,585,792	12,560,346,602,995	15.71%
PIUTANG PPN IMPOR	0	0	0.00%
PIUTANG PPNBM DALAM NEGERI	280,485,129,787	280,039,959,243	0.16%
PIUTANG PBB PEDESAAN	1.327.539.551.494	746,285,302,993	77.89%
PIUTANG PBB PERKOTAAN	7,542.885.445.039	4,527,189,629,491	66.61%
PIUTANG PBB PERKEBUNAN	474.394.030.911	212,754,667,994	122.98%
PIUTANG PBB KEHUTANAN	492.606.633.014	477,992,946,905	3.06%
PIUTANG PBB PERTAMBANGAN	158,566.341.854	64,058,196,664	147.53%
PIUTANG BPHTB	179,947.361.649	803,339,377,782	-77.60%
PIUTANG PTLL	16,386.067.497	815,162,918	1910.16%
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPH	2,263.304.065.654	2,788,050,134,099	-18.82%
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPN	0	0	0.00%
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPNBM	0	0	0.00%
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PTLL	0	0	0.00%
TOTAL	**49,999.727.823.996**	**45,173,077,395,396**	**10.68%**

Tabel IV.C.2.1.4.c
Rincian Piutang Pajak Per Umur Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	13.167.888.974.329
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	8.560.076.978.097
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	4.081.192.979.365
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	4.122.857.129.779
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	4.915.095.943.870
Lebih dari 5 Tahun	15.152.615.818.556
Jumlah	**49,999.727.823.996**

Grafik IV.C.2.1.4.
Komposisi per Jenis Piutang Pajak Per 31 Desember 2009
(dalam prosentase)



Penyisihan, Daluwarsa, Usulan Penghapuasn dan Penghapusan Piutang Pajak

Nilai piutang pajak sebesar Rp 49.999.727.823.996,00 tersebut, terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp 6.762.438.777.192,00 dan piutang sebesar Rp 2.154.828.792.785,00 telah daluwarsa penagihannya. Dari piutang pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp 2.154.828.792.785,00 tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp272.841.551.695,00 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan sebesar Rp168.228.943.345,00.

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melayani Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Nominal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak dan banding/gugatan yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah Rp16.933.794.811.219,00 dan $75.149.571,00.

Barang Sitaan dalam Rangka Penagihan Pajak

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga benda Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang dengan estimasi harga pasar Rp2.849.986.956.896,00 dari piutang pajak sebesar Rp8.898.001.049.618,00.

SP3DRI

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu KPPBC kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama terkait. Dalam SP3DRI tersebut antara lain disampaikan bahwa importir (Wajib Pajak) telah melakukan transaksi impor dan terdapat kewajiban PPN dan PPh Pasal 22 dalam rangka Impor yang belum dipenuhi.

Tindak lanjut SP3DRI mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-78/PJ./2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam SE tersebut antara lain diatur bahwa KPP dapat melakukan himbauan, penelitian/pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SKPKB sebagai tindak lanjut SP3DRI tersebut digunakan sebagai penambahan piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari masing-masing KPP.

Piutang PBB Migas

Berkenaan dengan temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan bahwa Piutang PBB tercatat pada Laporan Keuangan DJP minimal sebesar Rp10 Triliun belum dapat diyakini kewajarannya, dengan ini dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- dalam temuan tersebut Tim Pemeriksa BPK RI mempermasalahkan saldo piutang PBB sebesar Rp10 Triliun tersebut dengan pertimbangan perhitungan sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Piutang PBB Per 01/01/ 2009	Rp	6.028.280.744.000,00
b.	Penerbitan SPPT dalam Tahun 2009	Rp	13.502.409.174.000,00
c.	Total Piutang PBB (a+b)	Rp	19.530.689.918.000,00
d.	Realisasi PBB (pembayaran berdasarkan LRA)	Rp	24.183.053.872.449,00
e.	Saldo Akhir Per 31/12 2009 (c-d)	RP	(4.652.363.954.449,00)

- selanjutnya Tim Pemeriksa BPK RI menyampaikan bahwa apabila nilai piutang yang dilaporkan sebesar Rp10.007.377.567.000,00 sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka terdapat kekurangan pencatatan penambahan piutang melalui penerbitan SPPT sebesar Rp14.659.741.521.449,00 (4.652.363.954.449,00+10.007.377.567.000,00).
- berkenaan dengan permasalahan tersebut dapat disampaikan bahwa jumlah penerbitan SPPT dalam Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas belum memperhitungkan penerbitan SPPT PBB Migas dalam tahum 2009 sebesar Rp14.252.331.349.192,00.
- perlu diiformasikan bahwa penerbitan SPPT PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi didahului dengan pendaftaran obyek pajak oleh KKS dengan mengisi SPOP dan disampaikan ke Dirjen Pajak melalui BP Migas. Selanjutnya, Dirjen Pajak melakukan pembagian data objek PBB Migas ke masing KPP Pratama untuk dilakukan usulan penghitungan PBB sebagai dasar bagi KPP Pratama untuk menerbitkan SPPT. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, KPP Pratama menerbitkan SPPT per kabupaten/kota yang biasanya diterbitkan di akhir tahun.
- berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disampaikan bahwa saldo piutang PBB sebesar Rp 10 trilliun adalah valid sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

C.2.1.5. Piutang Bukan Pajak

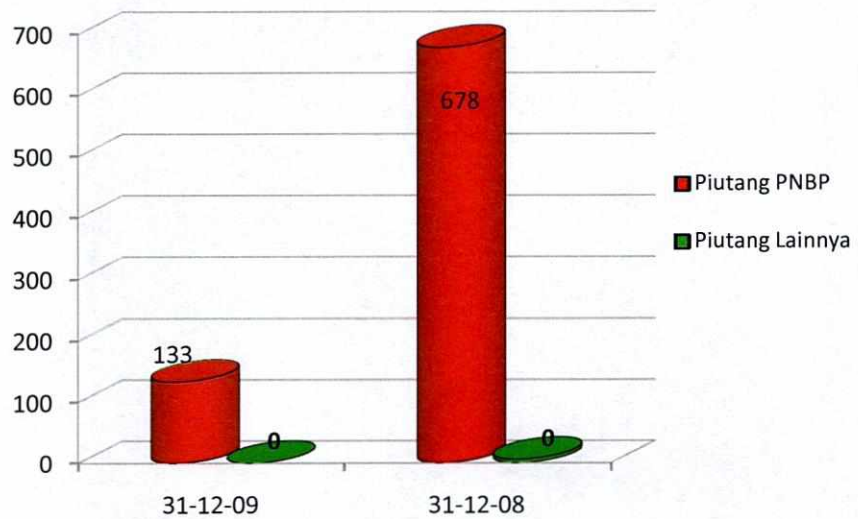
Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2008 *audited* sebesar Rp684.051.351,00 mengalami penurunan sebesar Rp551.356.372,00 di tahun 2009 sehingga Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp132.694.979,00. Piutang penerimaan negara bukan pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Tabel IV.C.2.1.5.
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-09	31-Des-08	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	132.694.979	678.439.351	(545.744.372)	(80,44)
Piutang Lainnya	0	5.612.000	(5.612.000)	(100,00)
Jumlah	**132.694.979**	**684.051.351**	**(551.356.372)**	(80,60)

Grafik IV.C.2.1.5.
Komposisi Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
(dalam jutaan rupiah)



Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak di T.A. 2009 tersebut merupakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah yang baru di setor pada awal Januari 2010 di Kantor Pusat DJP, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Piutang PNBP Per 31 Desember 2009 dan 2008
(Rupiah)

No	Denda Keterlambatan Penyelesaian Atas Pekerjaan Pemerintah	2009	2008
1	Tahun 2008: a.n. PT. Mitra Infosarana; dan Tahun 2009: a.n. PT. Karya Kita	56.977.344	195.819.637
2	Tahun 2008: a.n. PT. Multi Informatika Solusindo; dan Tahun 2009: a.n. PT. Indonesia Comnets Plus	1.076.000	17.336.000
3	Tahun 2008: a.n. PT. Multi Informatika Solusindo; dan Tahun 2009: a.n. PT. Astra Graphia Information Technology	74.641.635	60.368.000

4	Tahun 2008: a.n. PT. Nusantara Compnet Integrator	0	242.841.800
5	Tahun 2008: a.n. PT. Astragraphia Tbk	0	162.073.914
6	Tahun 2008: merupakan piutang lainnya di KPP Pratama Denpasar Barat	0	5.612.000
Jumlah		**132.694.979**	**684.051.351**

Bagian Lancar TGR

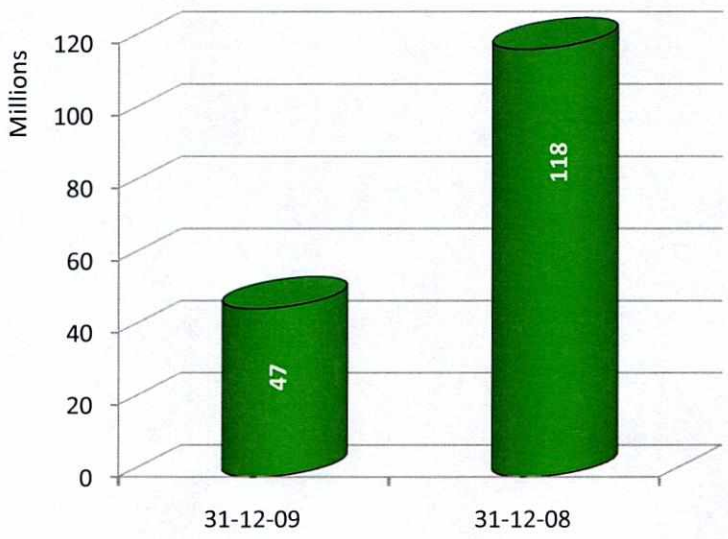
C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (BL-TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp53.764.428,00 dan per 31 Desember 2008 *audited* sebesar Rp118.258.820,00, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp71.571.476,00 karena terdapat 7 debitur yang melakukan pelunasan.

Tabel IV.C.2.1.6.
Bagian Lancar Tagihan TGR
Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	31/12/2009	31/12/2008
Bagian Lancar Tagihan TGR	53.764.428	118.258.820
Jumlah	**53.764.428**	**118.258.820**

Grafik IV.C.2.1.6.
Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)



Uang Muka Belanja

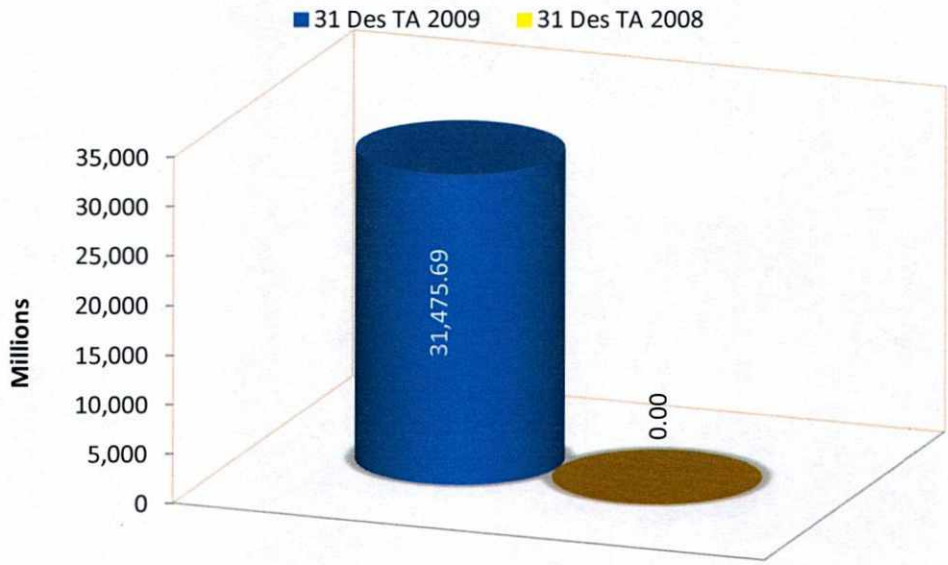
C.2.1.7 Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp31.475.685.666,00 dan per 31 Desember 2008 *audited* sebesar Rp0,00, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp31.475.685.666,00.

Tabel IV.C.2.1.7
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Uraian	31/12/2009	31/12/2008
Uang Muka Belanja	31.475.685.666	0
Jumlah	**31.475.685.666**	**0**

Grafik IV.C.2.1.7.
Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)



Persediaan

C.2.1.8 Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp.88.200.439.352,00, terdapat beberapa koreksi sehingga saldo Persediaan per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp.88.104.072.274,00. Rincian koreksi tersebut sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6A berikut:

Tabel IV.C.2.1.7.a
Koreksi Saldo Persediaan per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31-Desember-08 Revisi	31-Desember-08 Audited	Selisih
Barang Konsumsi	78,385,537,196	78,475,446,374	(89,909,178) *
Bahan Untuk Pemeliharaan	310,168,960	316,626,860	(6,457,900) **
Suku Cadang	6,793,000	6,793,000	0
Pita Cukai, Materai dan Legas	8,814,239,125	8,814,239,125	0
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	464,933,802	464,933,802	0
Bahan Baku	26,399,492	26,399,492	0
Persediaan untuk tujuan strategis	140,000	140,000	0
Persediaan Lainnya	95,860,699	95,860,699	0
Jumlah	88,104,072,274	88,200,439,352	(96,367,078)

***) Perbedaan saldo Barang Konsumsi sejumlah Rp. 89.909.178,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:**

1. **Terdapat perbedaan saldo Barang Konsumsi sejumlah (Rp.50,00) pada Bagian Umum Kanwil DJP Kalimantan Timur akibat masalah teknis (system failure) pada saat kompilasi ulang.**
2. **Terdapat selisih pembulatan pada saat kompilasi ulang Rp. 21,00 akibat masalah teknis (system failure) pada KPP Pratama Kuala Tungkal.**
3. **Terdapat koreksi saldo akhir 31 Desember 2008 akibat double accounting transaksi tahun 2008 sejumlah (Rp.96.061.599,00) pada KPP Pratama Barabai serta koreksi pencatatan akun dari Barang Pemeliharaan menjadi Barang Konsumsi sejumlah Rp.6.152.450,00 pada KPP Pratama Biak, Karikpa Ambon dan Karikpa Jayapura.**

****) Perbedaan saldo Barang Pemeliharaan sejumlah Rp.6.457.900,00 yang disebabkan adanya koreksi saldo akhir 31 Desember 2008 akibat double accounting transaksi tahun 2008 sejumlah (Rp.305.450,00) pada KPP Pratama Barabai, dan Koreksi pencatatan akun dari Barang Pemeliharaan menjadi Barang Konsumsi sejumlah (Rp.6.152.450,00) pada KPP Pratama Biak, Karikpa Ambon dan Karikpa Jayapura.**

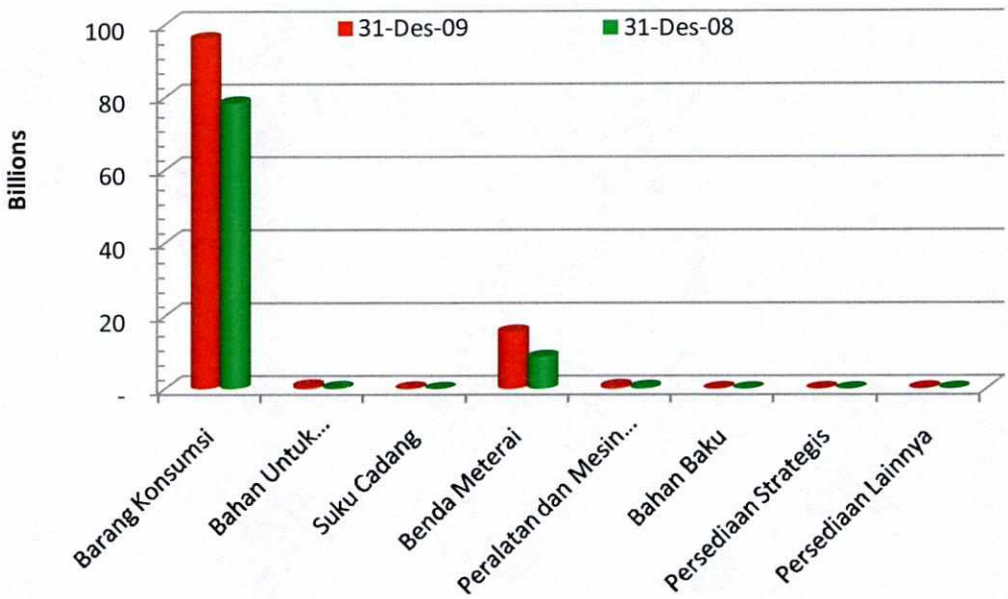
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp.88,200,439.352,00 sedangkan Jumlah Persediaan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.113.685.538.106,00 yang merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya Per 31 Desember 2009 sebesar Rp.113.685.538.106,00 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.7.b dan Grafik IV.C.2.1.7. berikut:

Tabel IV.C.2.1.7.b
Jenis Persediaan Per 31 Desember TA 2009 dan 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31-Desember-09	31-Desember-08	% Kenaikan / (penurunan)
Barang Konsumsi	96,142,283,986	78,385,537,196	18,46
Bahan Untuk Pemeliharaan	752,504,144	310,168,960	58,78
Suku Cadang	136,589,600	6,793,000	95,07

Pita Cukai, Materai dan Legas	15,688,513,386	8,814,239,125	43,81
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	686,671,250	464,933,802	32,29
Bahan Baku	87,386,822	26,399,492	69,79
Persediaan untuk tujuan strategis	33,424,000	140,000	99,58
Persediaan Lainnya	158,165,042	95,860,699	39,39
Jumlah	113,685,538,230	88,104,072,274	22,50

Grafik IV.C.2.1.7.
Komposisi Persediaan Per 31 Desember 2009
(dalamjutaanrupiah)



Aset Tetap

C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan penyusutan (depresiasi). Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.13.731.750.550.246,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember Tahun Anggaran 2009 menurut jenis aset tetap sebagaimana Tabel IV.C.2.2. dan Grafik IV.C.2.2.berikut:

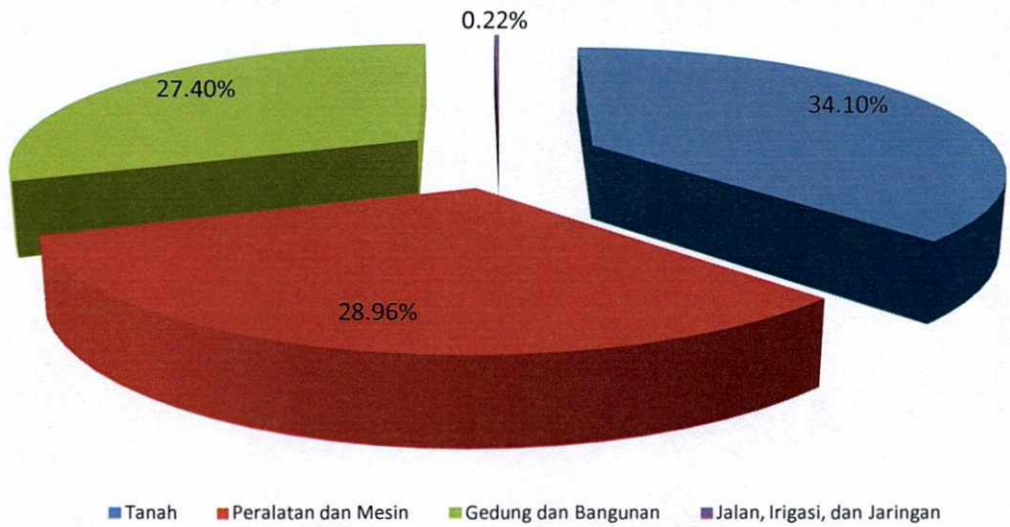
Tabel IV.C.2.2.
Aset Tetap Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Desember-09	31-Desember-08	% Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	5,868,476,257,110	3,736,360,295,112	57.06
2	Peralatan dan Mesin	3,365,882,008,418	3,217,317,808,089	4.62

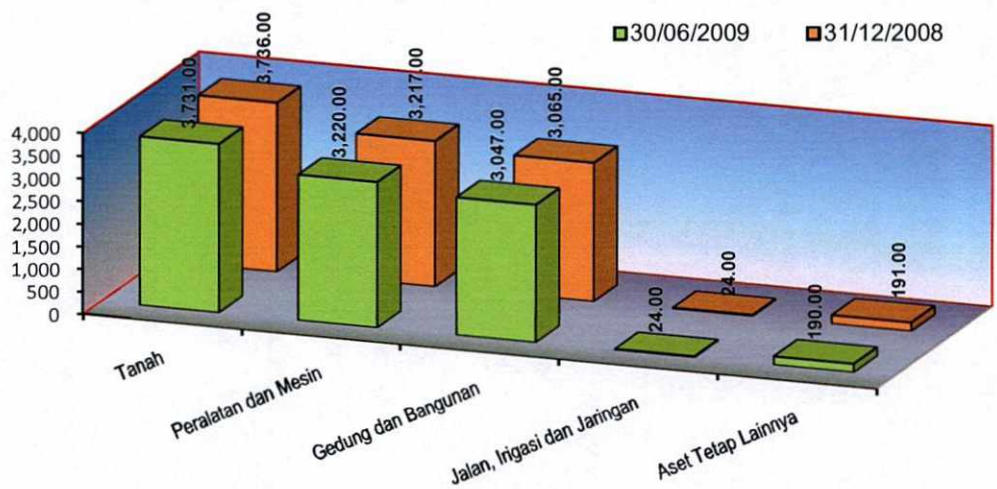
3	Gedung dan Bangunan	4,011,871,869,277	3,065,068,755,475	30.89
4	Jalan dan Jembatan	6,527,464,813	6,430,539,563	1.51
5	Irigasi	1,594,013,846	1,568,610,956	1.62
6	Jaringan	31,275,059,990	16,232,428,971	92.67
7	Aset Tetap Lainnya	188,941,009,001	191,293,118,826	-1.23
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	257,182,867,791	819,133,035,048	-68.60
	Jumlah	**13,731,750,550,246**	**11,147,892,781,648**	25.49

***) Saldo Peralatan dan Mesin di SIMAK-BMN per 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.217.326.806.589, terdapat perbedaan pencatatan dengan Laporan BMN sebesar Rp 8.998.500,00 sehingga Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.217.317.808.089, disebabkan oleh aset berupa sepeda motor di Kanwil DJP Sumatera Utara I yang Hilang belum dihapuskan dari Laporan BMN karena sedang dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai Rp. 11.200.000,00 dan koreksi saldo awal di KPP Pratama Candisari karena perbaikan saldo negatif ekstrakomptabel senilai (Rp. 2.201.500,00).**

Grafik IV.C.2.2.
Aset Tetap Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008



Grafik IV.C.2.2.1
Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
(dalam milyar rupiah)



Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Aset

Dalam Tahun Anggaran 2009 terdapat realisasi balanja modal brutto sebesar Rp648.482.990.590,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	MAK	URAIAN	REALISASI BELANJA
1.	531111	Belanja Modal Tanah	1.656.820.500,00
2.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.385.671.566,00
3.	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.289.453.983,00
4.	534131	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.788.859.982,00
5.	536111	Belanja Modal Fisik Lainnya	68.362.184.559,00
JUMLAH			648.482.990.590,00

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (Gabungan)	Rp	94.914.165.893,00
Pengembangan /Penyelesaian Pembangunan (2009)	Rp	0,00
Pengembangan (Gabungan)	Rp	27.752.585.412,00
Penambahan Aset Tak Berwujud	Rp	65.973.380.531,00
Perolehan/Pengembangan KDP	Rp	462.725.653.430,00
Penerimaan Aset Renovasi	Rp	2.186.297.606,00
Jumlah	Rp	653.552.082.902,00
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	Rp	5.069.092.312,00

Selisih sebesar Rp.5.069.092.312,00 tersebut merupakan penambahan BMN yang didanai selain dari Belanja Modal.

Tanah

C.2.2.1 Tanah

Jumlah Tanah per 31 Desember 2009 adalah sebesar **Rp. 5.868.476.257.110,00** Rincian jumlah tanah yang dimiliki tiap Kanwil dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.1 berikut:

Tabel IV.C.2.2.1
Rincian Aset Tetap – Tanah per Kanwil
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	332,326,690,000	2,153,261,292,805	14,676,080,387	2,470,911,902,418	643.52
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	67,785,949,580	19,647,381,344	15,876,034,000	71,557,296,924	5.56
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	88,346,019,058	11,684,374,302	11,649,404,302	88,380,989,058	0.04
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	72,097,704,988	5,445,013,062	6,890,110,450	70,652,607,600	(2.00)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	102,193,131,474	796,360,000	72,000,000	102,917,491,474	0.71
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	60,297,669,837	9,488,077,798	9,625,121,434	60,160,626,201	(0.23)

7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	75,303,609,670	4,929,453,289	2,798,100,000	77,434,962,959	2.83
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	30,913,548,300	19,828,755,200	11,355,559,000	39,386,744,500	27.41
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	214,020,902,547	19,185,545,000	9,550,765,200	223,655,682,347	4.50
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	151,141,596,188	0	0	151,141,596,188	0.00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	235,317,524,554	19,174,649,554	19,174,649,554	235,317,524,554	0.00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	120,225,542,711	0	0	120,225,542,711	0.00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	63,854,474,000	0	0	63,854,474,000	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	75,192,718,232	0	75,192,718,232	0	(100.00)
15	Kanwil DJP Banten	84,407,256,000	0	0	84,407,256,000	0.00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	220,077,475,787	8,634,233,885	14,953,105,765	213,758,603,907	(2.87)
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	191,189,701,326	35,435,033,186	33,735,150,000	192,889,584,512	0.89
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	185,433,443,798	9,520,000,000	9,520,000,000	185,433,443,798	0.00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	125,526,846,909	5,357,218,500	3,278,220,495	127,605,844,914	1.66
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	37,916,589,835	3,114,919,293	3,106,113,117	37,925,396,011	0.02
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	212,753,677,830	14,910,778,303	24,485,244,191	203,179,211,942	(4.50)
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	109,682,326,963	23,572,840,906	2,771,553,000	130,483,614,869	18.97
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	164,161,425,516	4,346,760,000	0	168,508,185,516	2.65
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	64,592,989,375	1,403,640,000	1,403,640,000	64,592,989,375	0.00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	80,286,225,400	13,946,109,800	14,000,788,800	80,231,546,400	(0.07)
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	233,778,419,310	16,094,243,000	5,701,237,000	244,171,425,310	4.45
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	94,053,390,998	5,173,320,500	2,785,117,000	96,441,594,498	2.54
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	77,834,593,793	14,841,856,560	9,629,078,637	83,047,371,716	6.70
29	Kanwil DJP Bali	61,840,092,000	10,648,310,000	10,648,310,000	61,840,092,000	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	63,578,538,240	11,183,142,624	8,164,198,349	66,597,482,515	4.75
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	40,230,220,893	29,180,838,484	17,645,886,484	51,765,172,893	28.67
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0,00
	Total	3,736,360,295,112	2,470,804,147,395	338,688,185,397	5,868,476,257,110	57.06

Mutasi tanah selama Tahunan TA 2009 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Kuantitas	**Rupiah**
Saldo Awal Tahun 2009	3.383.529	3.736.360.295.112
Penambahan Saldo Awal	45.233	22.333.764.164
Pembelian	0	0
Transfer Masuk	803.811	267.638.067.093
Penyelesaian Pembangunan	2.657	1.656.820.500
Reklasifikasi Masuk	5.482	15.215.858.303
Pertukaran	0	0
Perolehan Lainnya	0	0
Pengurangan Nilai Aset	0	0
Pengembangan Nilai Aset	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-6.391	-13.381.014.765
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	-17.226	2,152,051,757,185
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-14,676,080,387

Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	517.832.106
Penghapusan	-1	-995.112.000
Transfer Keluar	-315.289	-266.995.999.022
Hibah (keluar)	0	0
Reklasifikasi Keluar	-6.383	-24.876.305.179
Koreksi Pencatatan	-18.493	-6.373.626.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	0	0
Saldo Akhir Tahun 2009	**3.869.931**	**5.868.476,257.110**

Saldo akhir Aset Tetap - Tanah Tahunan TA 2009 sebesar Rp. **5.868.476.257.110,00** mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,132,115,961,998 atau 57,06 persen dari saldo akhir Tahunan TA 2008 sebesar Rp.3.736.360.295.112,00. Kuantitas Aset Tetap - Tanah Tahunan TA 2009 per 31 Desember 2009 sejumlah 3.869.931 meter persegi. Terdiri atas 3.543.150 meter persegi Tanah Persil, 110.359 Tanah Non Persil, dan 216.422 meter persegi Lapangan.

Peralatan dan Mesin

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 3,365,861,808,418,00. Rincian jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki tiap kantor wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.2.
Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	663,871,869,362	425,112,910,969	458,683,285,009	630,301,495,322	(5.06)
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	62,857,934,632	7,164,061,494	5,188,420,754	64,833,575,372	3.14
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	72,557,081,121	6,100,959,246	5,495,568,699	73,162,471,668	0.83
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	84,036,259,507	13,074,008,252	15,992,393,345	81,117,874,414	(3.47)
5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	75,499,397,662	9,752,160,395	1,428,763,182	83,822,794,875	11.02
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	67,357,638,134	12,517,860,369	4,729,336,650	75,146,161,853	1.56
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	87,623,077,087	12,978,708,122	5,006,375,164	95,595,410,045	9.10
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	67,797,432,914	32,976,600,989	29,990,253,535	70,783,780,368	4.40
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	100,945,332,098	66,386,986,119	9,202,476,857	158,129,841,360	56.65
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	81,887,681,559	6,565,686,116	8,648,651,119	79,804,716,556	2.54)
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	101,788,147,241	28,666,784,849	11,306,423,702	119,148,508,388	17.06
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	66,833,864,486	3,868,530,767	3,467,982,120	67,234,413,133	0.60
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	59,869,090,533	7,590,770,789	3,444,081,853	64,015,779,469	6.93
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	55,460,947,393	11,709,118,420	950,023,074	66,220,042,739	19.40
15	Kanwil DJP Banten	72,858,116,327	4,653,939,546	1,804,484,517	75,707,571,356	3.91
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	120,691,868,176	9,921,040,094	2,643,677,132	127,969,231,138	6.03
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	127,715,980,243	13,553,689,440	12,925,695,964	128,343,973,719	0.49

18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	131,069,733,815	12,221,374,600	3,123,136,119	140,167,972,296	6.94
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	86,090,458,359	6,999,122,825	7,363,909,747	85,725,671,437	(0.42)
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	39,467,995,839	2,140,062,808	246,145,999	41,361,912,648	4.80
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	111,039,953,020	4,959,111,173	6,188,913,778	109,810,150,415	(1.11)
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	128,439,488,612	3,958,104,124	3,972,776,234	128,424,816,502	(0.01)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	130,106,230,971	7,172,037,367	2,908,851,546	134,369,416,792	3.28
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	49,997,933,173	5,546,601,770	3,633,667,183	51,910,867,760	3.83
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	74,994,493,395	23,807,674,018	19,763,480,347	79,038,687,066	5.39
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	58,686,821,390	8,410,448,609	3,969,338,119	63,127,931,880	7.57
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat,Selatan dan Tenggara	107,310,869,413	22,560,282,152	15,814,898,173	114,056,253,392	6.29
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara,Tengah, Gorontalo,dan Maluku Utara	100,034,053,749	13,665,579,961	9,587,032,674	104,112,601,036	4.08
29	Kanwil DJP Bali	58,328,450,811	4,317,125,769	5,246,307,425	57,399,269,155	(1.59)
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	76,674,692,061	29,833,629,285	16,980,323,592	89,527,997,754	16.76
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	67,338,019,728	23,453,928,363	19,635,972,259	71,155,975,832	5.67
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	28,095,893,778	7,267,797,900	1,008,849,000	34,354,842,678	22.28
TOTAL		3,217,326,806,589	848,906,696,700	700,351,494,871	3,365,882,008,418	4.62

***) Saldo Peralatan dan Mesin di SIMAK-BMN per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.365.882.008.418, terdapat perbedaan pencatatan dengan Laporan BMN sebesar Rp 20.200.000,00 sehingga Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 sebesar Rp3.365.861.808.418, disebabkan oleh aset berupa sepeda motor di Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Kanwil DJP Jakarta Timur yang Hilang belum dihapuskan dari Laporan BMN karena sedang dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) masing- masing senilai Rp11.200.000,00 dan senilai Rp9.000.000,00.**

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

MA	Uraian	Jumlah	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	482.658.770
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp	115.256.564.403
	Jumlah Belanja	Rp	115.739.223.173

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Rincian transaksi mutasi nilai asset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

100	**Saldo Awal 2009**	**3,217,326,806,589**
100	Koreksi Saldo Awal Simak BMN	13,791,545,175
101	Pembelian	85,921,232,223
102	Transfer Masuk	400,426,721,024
103	Hibah	665,478,990
104	Rampasan	0
105	Penyelesaian Pembangunan	134,030,706,000
106	Pembatalan Penghapusan	16,930,000
107	Reklasifikasi Masuk	192,641,790,290
108	Bangun Serah Guna	0
109	Bangun Guna Serah	0

110	Kerjasama Pemanfaatan	0
111	Pertukaran	0
112	Perolehan Lainnya	763,717,050
177	Reklasifikasi Rr Aset Lainnya Ke Aset Tetap	2,249,283,807
188	Reklasifikasi Dr Aset Tetap Ke Aset Lainnya	0
199	Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	197,232,101
201	Pengurangan Nilai Aset	0
202	Pengembangan Nilai Aset	70,389,132
203	Koreksi Perubahan Kondisi	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai	-22,993,588,447
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-40,616,921,333
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
301	Penghapusan	-5,224,569,589
302	Tranfer Keluar	-357,735,376,244
303	Hibah (Keluar)	-72,790,190
304	Reklasifikasi Keluar	-146,302,102,978
305	Koreksi Pencatatan Nilai	-13,623,253,090
399	Penghapusan Semu Krn Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	-18,938,692
501	Saldo Awal Kdp	0
502	Perolehan Kdp	0
503	Pengembangan Kdp	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-56,609,364,810
Saldo Akhir 2009		3,365,882,008,418
Total Penambahan Aset		848,906,696,700
Total Pengurangan Aset		700,351,494,871

Saldo akhir Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahunan TA 2009 sebesar Rp.3,365,882,008,418,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.148,555,201,829.00 atau 4.62 persen dari saldo akhir Tahunan TA 2008 sebesar Rp.3.217.326.806.589,00. Kuantitas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 sejumlah 569.346 buah, yang terdiri sebagian besar atas 112.727 buah Alat Kantor, 297.639 buah Alat Rumah Tangga, 65.640 buah komputer, 28.650 buah peralatan komputer, dan lain-lain.

Gedung dan Bangunan

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 4.011.871.869.277,00. Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki tiap kantor wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.3. berikut:

Tabel IV.C.2.2.3.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	228,733,449,579	912,499,901,814	100,072,196,745	1,041,161,154,648	355.19
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	79,631,214,174	8,051,047,416	6,624,350,818	81,057,910,772	1.79
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	68,027,886,302	20,798,806,644	20,513,465,145	68,313,227,801	0.42
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	44,400,204,501	13,840,799,589	3,100,023,922	55,140,980,168	24.19
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	62,686,778,019	5,795,252,970	4,521,933,000	63,960,097,989	2.03
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	55,161,102,730	11,885,559,614	9,253,064,312	57,793,598,032	4.77
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	108,536,108,262	2,730,218,921	2,402,180,807	108,864,146,376	0.30
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	56,645,500,466	30,434,424,624	5,327,024,052	81,752,901,038	44.32
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	358,598,745,901	196,223,927,696	225,211,177,326	329,611,496,271	-8.08
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	73,659,120,323	78,634,142	0	73,737,754,465	0.11
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	138,116,908,669	11,265,920,021	11,237,034,021	138,145,794,669	0.02
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	65,781,305,799	6,563,659,503	6,444,429,532	65,900,535,770	0.18
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	60,886,378,402	705,773,000	0	61,592,151,402	1.16
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	105,329,352,206	0	0	105,329,352,206	0.00
15	Kanwil DJP Banten	91,143,688,975	1,502,848,786	632,565,851	92,013,971,910	0.95
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	117,615,235,407	2,863,640,044	186,008,129	120,292,867,322	2.28
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	146,921,361,961	92,620,923,769	76,168,706,671	163,373,579,059	11.20
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	98,801,595,711	9,940,790,186	1,560,225,142	107,182,160,755	8.48
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	79,786,695,408	34,364,164,442	10,774,760,190	103,376,099,660	29.57
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	77,490,537,639	219,299,870	185,956,800	77,523,880,709	0.04
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	126,375,994,376	1,126,467,752	185,744,332	127,316,717,796	0.74
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	135,247,371,255	24,763,608,038	10,735,630,240	149,275,349,053	10.37
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	119,797,264,767	20,880,875,540	14,820,214,900	125,857,925,407	5.06
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	40,803,488,445	564,211,000	564,211,000	40,803,488,445	0.00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	42,819,074,201	10,808,023,833	11,294,175,002	42,332,923,032	-1.14
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	57,253,333,987	2,997,478,802	8,577,229,800	51,673,582,989	-9.75
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat,Selatan dan Tenggara	64,945,047,616	2,112,113,711	1,532,954,711	65,524,206,616	0.89
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	123,686,946,052	19.981.880.730	15,752,127,930	127.916.698.852	7.99
29	Kanwil DJP Bali	51,252,026,205	27,191,035,000	13,031,169,000	65,411,892,205	27.63
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	68,620,285,896	25,040,530,559	10,509,515,620	83,151,300,835	21.18
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	104,563,092,341	43,784,368,683	23,614,997,899	124,732,463,125	19.29
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	11,751,659,900	0	0	11,751,659,900	0.00
TOTAL		3,065,068,755,475	1,541,636,186,699	594,833,072,897	4,011,871,869,277	30.89

***) Terhadap pengkapitalisasian aset gedung dan bangunan pada KPP Pratama Kotamobagu senilai Rp.13.881.478.264,00 tetap diklasifikasikan sebagai gedung dan bangunan meskipun penyelesaian pembangunan belum seluruhnya selesai namun realisasi belanja modal atas pembangunan tersebut sudah mencapai 100% karena sampai saat ini masih dilakukan upaya hukum terhadap pembangunan tersebut.**

Rincian transaksi mutasi nilai asset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

		Kuantitas	Nilai
A	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**		
	SALDO AWAL	2,080	2,874,671,859,112
1	Penambahan Saldo Awal	41	29,877,097,050
2	Pembelian	1	8,783,906,000
3	Transfer Masuk	140	175,504,049,494
4	Penyelesaian Pembangunan	8	874,917,775,887
5	Reklasifikasi Masuk	12	220,791,292,992
6	Perolehan Lainnya	5	280,103,338
7	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	2	91,768,000
8	Pengurangan Nilai Aset	0	-625,538,154
9	Pengembangan Nilai Aset	0	27,647,124,210
10	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	10,758,228,297
11	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	-193,970,360
12	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	166,015,470,448
13	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-103,589,998,179
14	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	1,701,473,500
15	Pengembangan Melalui KDP	0	578,352,800
16	Penghapusan	-7	-8,716,585,354
17	Transfer Keluar	-139	-180,154,231,964
18	Reklasifikasi Keluar	-10	-262,087,291,133
19	Koreksi Pencatatan	-18	-9,498,644,078
20	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-35	-9,858,435,228
B	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL**		
	SALDO AWAL	3,037	187,654,236,936
1	Penambahan Saldo Awal	53	5,034,722,085
2	Transfer Masuk	169	13,760,671,482
3	Reklasifikasi Masuk	18	2,144,716,824
4	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	8	53,511,545
5	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	0	47,400,000
6	Pengembangan Nilai Aset	0	35,072,070
7	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	40,299,601
8	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	-576,000
9	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	3,010,279,765
10	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-697,071,984
11	Penghapusan	-7	-332,857,750
12	Transfer Keluar	-173	-13,512,489,927
13	Reklasifikasi Keluar	-9	-1,074,249,072
14	Koreksi Pencatatan	-20	-1,336,205,535
15	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-89	-2,901,433,060

C	**RAMBU-RAMBU**		
	SALDO AWAL	5	68,343,624
1	Transfer Masuk	1	12,914,000
2	Transfer Keluar	-1	-12,914,000
3	Reklasifikasi Masuk	1	11,975,000
D	**TUGU/TANDA BATAS**		
	SALDO AWAL	98	2,674,315,803
1	Penambahan Saldo Awal	12	227,807,545
2	Transfer Masuk	2	141,358,000
3	Perolehan Lainnya	1	47,741,701
4	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	0	121,075,065
5	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0	-48,133,263
6	Transfer Keluar	-2	-141,358,000
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-3	-51,089,850
	TOTAL	5,181	4,011,871,869,277

Saldo akhir Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahunan TA 2009 sebesar Rp.4.011.871.869.277,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.946.803.113.802,00 atau 30,89 persen dari saldo akhir Tahunan TA 2008 sebesar Rp.3.065.068.755.475,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 sebanyak 5.181 unit, yang terdiri atas 2.080 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 2.987 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, 2 unit Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat, 4 unit Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara dan 108 unit Tugu/Tanda Batas.

KPP Pratama Kotamobagu

Nilai gedung dan bangunan sebesar Rp.4.011.871.869.277,00 tersebut termasuk nilai gedung dan bangunan dari KPP Pratama Kotamobagu yang secara fisik belum mencapai kondisi 100% (Kontruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp8.635.000.000,00. Penyajian Gedung dan Bangunan tersebut sesuai dengan kondisi yang tercatat dalam SIMAK BMN satuan kerja yang bersangkutan dan tidak dilakukan koreksi dengan pertimbangan proses hukum atas transaksi perolehan aset tersebut sedang berlangsung dan untuk mencegah perubahan barang bukti yang ada.

Jalan dan Jembatan

C.2.2.4 Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2009 sebesar Rp.6.527.464.813,00. Rincian jumlah Jalan dan Jembatan yang dimiliki tiap Kantor Wilayah sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4 berikut:

Tabel IV.C.2.2.4
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN				% NAIK (TURUN)
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	
1	Instansi Pusat DJP	0	0	0	0	0.00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	0	0	0	0.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0.00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	175,373,650	25,183,000	0	200,556,650	14.36
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	0	0	0	0	0.00
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	192,859,695	6,791,888	6,791,888	192,859,695	0.00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	20,400,000	4,600,000	0	25,000,000	22.55
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	96,897,000	0	0	96,897,000	0.00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0.00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0.00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	43,704,122	0	43,704,122	100.00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0.00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0.00
15	Kanwil DJP Banten	0	28,588,228	0	28,588,228	100.00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0.00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	175,144,000	0	0	175,144,000	0.00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	326,957,714	0	5,150,000	321,807,714	1.58
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	1,023,833,539	0	0	1,023,833,539	0.00
20	Kanwil DJP DIY	249,279,260	0	0	249,279,260	0.00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0.00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0.00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	65,676,840	0	0	65,676,840	0.00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	428,177,000	0	0	428,177,000	0.00
25	Kanwil DJP Kalselteng	0	0	0	0	0.00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0.00
27	Kanwil DJP Sulselbartra	2,144,642,262	0	0	2,144,642,262	0.00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	1,531,298,603	396,661,000	396,661,000	1,531,298,603	0.00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0	0	0.00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0.00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0.00
	TOTAL	6,430,539,563	505,528,238	408,602,988	6,527,464,813	1.51

Saldo akhir Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Tahunan TA 2009 sebesar Rp.6.527.464.813,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.96.925.250,00 atau 1,51 persen dari saldo akhir TA 2008 sebesar Rp.6.430.539.563,00. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2009 terdiri atas 24.086 meter persegi Jalan dan 1 unit jembatan.

Irigasi

C.2.2.5 Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp.1.594.013.846,00. Rincian jumlah Irigasi yang dimiliki tiap kantor wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.5:

Tabel IV.C.2.2.5
Rincian Aset Tetap –Irigasi per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	77,095,470	0	0	77,095,470	0.00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	244,467,768	0	0	244,467,768	0.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0.00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	53,360,460	5,968,000	1,204,960	58,123,500	8.93
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	262,069,000	0	0	262,069,000	0.00
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	47,264,000	9,500,000	9,500,000	47,264,000	0.00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	70,430,000	0	0	70,430,000	0.00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	305,863,430	0	0	305,863,430	0.00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0.00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0.00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	5,940,000	0	0	5,940,000	0.00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	8,910,000	0	0	8,910,000	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0.00
15	Kanwil DJP Banten	2,900,000	0	558,000	2,342,000	(19.24)
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	30,892,000	0	0	30,892,000	0.00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	65,174,000	0	0	65,174,000	0.00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	61,048,607	0	0	61,048,607	0.00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	10,170,000	0	0	10,170,000	0.00
20	Kanwil DJP DIY	0	0	0	0	0.00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0.00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	21,349,950	21,601,750	14,237,900	28,713,800	34.49
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	7,440,000	0	0	7,440,000	0.00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	96,044,000	0	0	96,044,000	0.00
25	Kanwil DJP Kalselteng	0	0	0	0	0.00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	0	0	0	0.00
27	Kanwil DJP Sulselbartra	93,193,000	88,488,000	88,488,000	93,193,000	0.00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	94,489,771	0	0	94,489,771	0.00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	9,509,500	13,834,000	0	23,343,500	0.00

31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	0	0	0	0.00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0.00
TOTAL		1,568,610,956.00	139,391,750	113,988,860	1,594,013,846	1,62

Saldo akhir Aset Tetap – Irigasi Tahunan TA 2009 sebesar Rp.1.594.013.846,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.25.402.890,00 atau 1,62 persen dari saldo akhir Tahunan TA 2008 sebesar Rp.1.568.610.956,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2009 sebanyak 73 unit, yang terdiri atas 12 unit Bangunan Air Irigasi, 6 unit Bangunan Pengairan Pasang Surut, 3 unit Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, 17 unit Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, 25 unit Bangunan Air Bersih / Air Baku dan 10 unit Bangunan Air Kotor.

Jaringan

C.2.2.6 Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 31.275.059.990,00. Rincian jumlah Jaringan yang dimiliki tiap kantor wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.6:

Tabel IV.C.2.2.6
Rincian Aset Tetap – Jaringan per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	8,342,995,000	24,211,328,570	13,556,980,470	18,997,343,100	127.70
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	179,766,480	0	0	179,766,480	0.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	282,857,677	0	33,888,250	248,969,427	-11.98
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	411,200,210	0	0	411,200,210	0.00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepri	895,466,462	0	0	895,466,462	0.00
6	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	46,687,300	0	0	46,687,300	0.00
7	Kanwil DJP Sumsel Babel	71,823,000	6,600,000	0	78,423,000	9.19
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	301,511,000	44,296,670	20,893,070	324,914,600	7.76
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	27,213,908	0	0	27,213,908	0.00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	21,230,000	0	0	21,230,000	0.00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	616,369,000	382,250,000	0	998,619,000	62.02
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	175,445,026	0	0	175,445,026	0.00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	197,938,700	0	0	197,938,700	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0.00
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0.00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	50,077,416	0	0	50,077,416	0.00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	145,697,700	939,233,000	0	1,084,930,700	644.65
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	72,858,288	0	0	72,858,288	0.00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	298,297,000	178,360,000	0	476,657,000	59.79
20	Kanwil DJP DIY	0	0	0	0	0.00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	41,950,000	0	0	41,950,000	0.00

22	Kanwil DJP Jawa Timur II	36,012,600	0	0	36,012,600	0.00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	451,997,516	0	0	451,997,516	0.00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	200,000	0	0	200,000	0.00
25	Kanwil DJP Kalselteng	433,046,953	2,325,053,262	44,456,418	2,713,643,797	526.64
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	71,534,450	14,493,000	0	86,027,450	20.26
27	Kanwil DJP Sulselbartra	7,000,000	16,400,000	0	23,400,000	234.29
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	1,907,821,000	164,495,725	0	2,072,316,725	8.62
29	Kanwil DJP Bali	393,978,243	0	0	393,978,243	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	86,882,992	4,801,000	4,801,000	86,882,992	0.00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	664,571,050	416,339,000	0	1,080,910,050	62.65
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0.00
	TOTAL	16,232,428,971	28,703,650,227	13,661,019,208	31,275,059,990	92.67

Saldo akhir Aset Tetap – Jaringan TA 2009 sebesar Rp.31.275.059.990,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.15.042.631.019,00 atau 92,67 persen dari saldo akhir TA 2008 sebesar Rp.16.232.428.971,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2009 sejumlah 643 unit, terdiri atas 258 unit Instalasi Gardu Listrik, 272 Instalasi lain, 24 Instalasi Pembangkit Listrik, serta 13 Instalasi Pengaman dan lain-lain.

Aset Tetap Lainnya

C.2.2.7 Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 188,941,009,001,00. Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.2.7 berikut:

Tabel IV.C.2.2.7
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	183,650,921,176	0	0	183,650,921,176	0.00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	38,350,000	0	0	38,350,000	0.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	106,788,780	0	0	106,788,780	0.00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	4,432,900	0	1,102,900	3,330,000	(24.88)
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	319,344,778	0	3,000	319,341,778	(0.00)
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	198,576,058	43,275,000	78,448,200	163,402,858	(17.71)
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	248,578,500	0	248,050,000	528,500	(99.79)
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	668,127,500	32,604,000	646,135,000	54,596,500	(91.83)
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	81,869,000	0	0	81,869,000	0.00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0.00

11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	117,102,600	11,519,200	11,519,200	117,102,600	0.00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	6,300,000	0	0	6,300,000	0.00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	44,990,000	0	0	44,990,000	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0.00
15	Kanwil DJP Banten	8,973,000	0	0	8,973,000	0.00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	672,291,450	0	51,010,000	621,281,450	(7.59)
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	17,410,000	0	0	17,410,000	0.00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	81,883,500	142,000	0	82,025,500	0.17
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	513,969,000	0	509,148	513,459,852	(0.10)
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	5,940,000	0	0	5,940,000	0.00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	1,740,554,488	0	1,669,387,488	71,167,000	(95.91)
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	43,272,400	7,493,750	16,747,500	34,018,650	(21.38)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	1,258,287,640	0	0	1,258,287,640	0.00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	24,671,680	0	0	24,671,680	0.00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	44,950,560	0	0	44,950,560	0.00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	125,000	0	0	125,000	0.00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat Selatan dan Tenggara	65,052,000	0	7,851,000	57,201,000	(12.07)
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	962,489,934	30,096,398	820,737	991,765,595	3.04
29	Kanwil DJP Bali	83,895,640	0	0	83,895,640	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	56,004,854	4,000,000	4,000,000	56,004,854	0.00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	222,696,388	21,446,388	21,446,388	222,696,388	0.00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	5,270,000	254,344,000	0	259,614,000	4,826.26
Total		**191,293,118,826**	**404,920,736**	**2,757,030,561**	**188,941,009,001**	**(1.23)**

Realisasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Bruto)		0
Penambahan Aset Tetap Lainnya Intrakomptabel:		
Pembelian	16.538.700	
Pengembangan Nilai	0	
Perolehan KDP	0	
Jumlah Penambahan Aset Tetap Lainnya Intrakomptabel:		16.538.700
Selisih		(16.538.700)

Keterangan: Selisih sebesar Rp16.538.700,00 tersebut merupakan penambahan BMN yang didanai selain dari DIPA Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahunan TA 2009 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Kuantitas	Nilai
A	**Aset Tetap Lainnya**		
	SALDO AWAL	1,509	191,293,118,826
1	Penambahan Saldo Awal	3	24,142,000
2	Pembelian	4	16,538,700
3	Transfer Masuk	39	364,238,036
4	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)		-3,611,885
5	Penghapusan	-2	-137,000
6	Transfer Keluar	-16	-69,719,288
7	Reklasifikasi Keluar	-351	-2,641,130,688
8	Koreksi Pencatatan	-7	-28,366,700
9	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-62	-14,063,000
	TOTAL	1,117	188,941,009,001

Saldo akhir Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahunan TA 2009 sebesar Rp. 188,941,009,001,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2,352,109,825.00 atau (1.23) persen dari saldo akhir TA 2008 sebesar Rp.191.293.118.826,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2009 sejumlah 1.117 buah yang terdiri atas 416 buah aset tetap lainnya - eksakta, 324 buah aset tetap lainnya - non eksakta, 124 buah Koleksi Barang-barang Perpustakaan/Non Buku, 233 buah Barang Bercorak Kesenian, dan lain-lain.

KDP

C.2.2.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 257.182.867.791.00 Rincian KDP per kantor wilayah adalah sebagai berikut Tabel IV.C.2.2.8:

Tabel IV.C.2.2.8
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	646,833,444,749	282,687,472,715	929,520,917,464	0	(100.00)
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	3,442,073,460	0	3,442,073,460	100.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	55,905,507,798	31,344,749,198	0	87,250,256,996	56.07
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	4,583,571,254	9,346,430,245	2,144,111,445	11,785,890,054	157.13
5	Kanwil DJP Sumatera Riau dan Kepulauan Riau	0	0	0	0	0.00
6	Kanwil DJPSumatera Barat dan Jambi	0	9,420,376,973	0	9,420,376,973	100.00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0.00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	0	0	0	0.00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0.00
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	0	0	0	0.00

11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0.00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	0	0	0	0.00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	0	0	0	0	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	0	0	0	0	0.00
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0.00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0.00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	16,644,039,961	6,339,351,065	20,346,262,657	2,637,128,369	(84.16)
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	172,380,000	0	172,380,000	100
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	12,350,114,262	12,122,156,086	24,472,270,348	0	(100.00)
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	6,614,191,415	0	6,614,191,415	100.00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	0	0	0	0	0.00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	6,571,291,084	9,473,380,921	11,029,588,953	5,015,083,052	(23.68)
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	0	11,542,308,450	7,788,903,640	3,753,404,810	(67.48)
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	0	0	0	0	0.00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	801,390,255	0	0	801,390,255	0.00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	1,325,717,500	74,393,800	0	1,400,111,300	5.61
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat,Selatan dan Tenggara	7,950,183,740	55,688,284,167	0	63,638,467,907	700.46
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	5,647,758,000	0	5,647,758,000	100.00
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	11,843,570,816	5,619,757,935	13,903,397,151	3,559,931,600	69.94
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	54,324,203,629	13,190,589,000	15,470,369,029	52,044,423,600	(4.20)
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	0	0	0	0	0.00
	TOTAL	**819,133,035,048**	**462,725,653,430**	**1,024,675,820,687**	**257,182,867,791**	**(68.60)**

Saldo akhir Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahunan TA 2009 sebesar Rp. 257.182.867.791,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.561.950.167.257,00) atau (68.60) persen dari saldo akhir TA 2008 sebesar Rp.819.133.035.048,00.

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas perolehan harta tak berwujud seperti tuntutan ganti rugi atas kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh karyawan.

C.2.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam Tahunan TA 2009 tidak melaksanakan penjualan secara angsuran dan tidak mempunyai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2009.

C.2.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

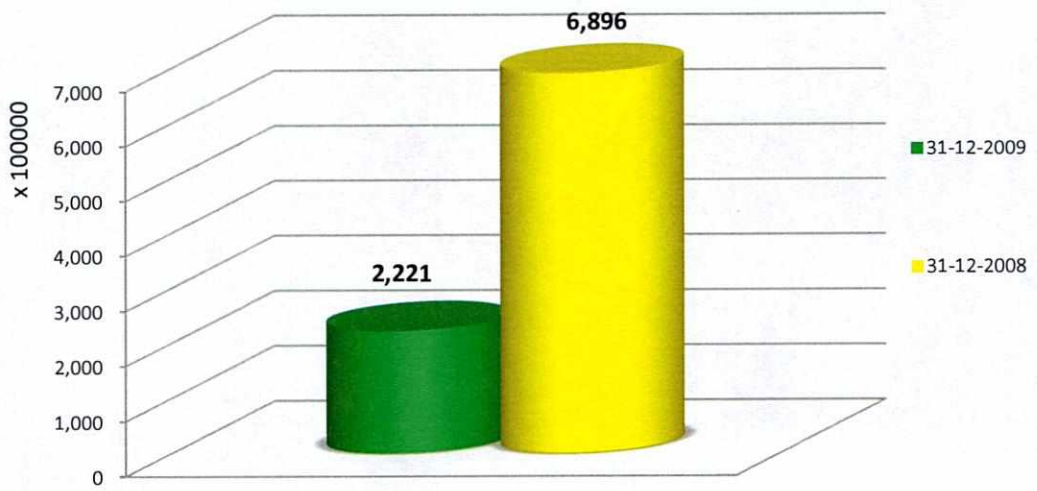
Tuntutan Perbendaharaan/ TGR

Jumlah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp689.565.763,00 mengalami penurunan sebesar 67,71 persen sehingga Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2009 menjadi sebesar Rp222.122.700,00. Rincian Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana Lampiran F.

Tabel IV.C.2.3.2
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember TA 2009 dan TA 2008
(dalam rupiah)

Perkiraan	31-12-2009	31-12-2008	Kenaikan (penurunan)
Tuntutan Perbendaharaan/TGR	222.122.700	689.565.763	(67,78)
Total	**222.122.700**	**689.565.763**	**(67,78)**

Grafik IV.C.2.3.2
Perbandingan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)



C.2.3.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam tahun 2009 tidak melakukan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan tidak mempunyai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2009.

C.2.3.4 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Jumlah Aset Tetap Tak berwujud per 31 Desember 2009 sebesar Rp.182.006.260.959,00. Rincian Aset Tak Berwujud yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.3.4 berikut:

Tabel IV.C.2.3.4
Rincian Aset Lainnya– Aset Tak Berwujud per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	79,036,207,461	124,023,012,545	25,501,866,018	177,557,353,988	124.65
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	385,357,688	0	0	385,357,688	0.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	0	0	0	0	0.00
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	22,344,300	0	0	22,344,300	0.00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	77,105,205	0	77,105,205	100.00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	49,524,900	11,675,400	603,900	60,596,400	22.36
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	29,054,300	1,310,800	372,900	29,992,200	3.23
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	22,939,000	77,734,230	66,305,100	34,368,130	49.82
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	48,196,500	30,038,250	11,880,000	66,354,750	37.68
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	268,737,500	44,573,299	0	313,310,799	16.59
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	214,023,840	0	0	214,023,840	0.00
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	59,977,250	5,500,250	0	65,477,500	9.17
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	173,013,530	0	0	173,013,530	0.00
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	60,527,500	0	0	60,527,500	0.00
15	Kanwil DJP Banten	0	0	0	0	0.00
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	0	0	0	0.00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	0	0	0	0.00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	0	0	0	0	0.00
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	0	0	0	0.00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0.00
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	10,345,500	0	0	10,345,500	0.00
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	0	0	0	0	0.00
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	374,358,370	0	0	374,358,370	0.00
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	47,724,080	0	0	47,724,080	0.00
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1,503,296,100	1,531,800	1,072,260	1,503,755,640	0.03
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	5,555,000	0	5,555,000	100.00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	0	0	0	0	0.00
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	380,053,201	9,194,562	10,726,989	378,520,774	(0.40)
29	Kanwil DJP Bali	0	0	0	0	0.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	384,646,512	34,381,038	2,227,932	416,799,618	8.36
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	136,845,415	28,981,836	0	165,827,251	21.18
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	24,211,000	19,337,896	0	43,548,896	79.87
Total		**83,231,383,947**	**124,369,932,111**	**25,595,055,099**	**182,006,260,959**	118.68

Realisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Bruto)		68.362.184.559
Penambahan Aset Tak Berwujud Intrakomptabel:		
Pembelian	65.973.380.531	
Pengembangan Nilai	-	
Perolehan KDP	-	
Jumlah Penambahan Aset Tak Berwujud Intrakomptabel:		65.973.380.531
Selisih		2.388.804.028

Keterangan: Selisih sebesar Rp2.388.804.028,00 tersebut telah dicatat sebagai pembelian peralatan dan mesin satuan kerja Kantor Pusat DJP

Rincian transaksi mutasi nilai asset lainnya Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

		Kuantitas	Nilai
A	**ASET TETAP TAK BERWUJUD**		
	SALDO AWAL		83,231,383,947
1	Penambahan Saldo Awal	768	31,353,548,977
2	Pembelian	3,810	65,973,380,531
3	Transfer Masuk	1,556	27,003,244,439
4	Reklasifikasi Masuk	197	38,710,714
5	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0	1,047,450
6	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0	-305,100
7	Transfer Keluar	-189	-22,622,669,339
8	Koreksi Pencatatan	-538	-2,972,080,660
	TOTAL	5,604	**182,006,260,959**

Saldo akhir Aset Tak Berwujud Tahunan TA 2009 sebesar Rp.182,006,260,959,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.98.774.877.012,00 atau 118,68 persen dari saldo akhir TA 2008 sebesar Rp.83.231.383.947,00.

C.2.3.5 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 75,856,127,457,00. Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki tiap Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.3.5 berikut:

Tabel IV.C.2.3.5
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

NO.	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	Instansi Pusat DJP	0	4,141,770	0	4,141,770	100.00
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh	0	702,991,424	0	702,991,424	100.00
3	Kanwil DJP Sumatera Utara I	382,763,544	3,583,196,869	17,353,875	3,948,606,538	931.60
4	Kanwil DJP Sumatera Utara II	0	8,330,241,749	34,947,000	8,295,294,749	100.00
5	Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0	973,612,437	63,700,000	909,912,437	100.00
6	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0	1,249,221,075	0	1,249,221,075	100.00
7	Kanwil DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	0	265,370,019	0	265,370,019	100.00
8	Kanwil DJP Bengkulu Dan Lampung	0	2,910,596,096	239,686,000	2,670,910,096	100.00
9	Kanwil DJP Jakarta Pusat	187,475,638	2,564,264,003	975,466	2,750,764,175	1,367.26
10	Kanwil DJP Jakarta Barat	0	4,580,645,907	96,933,550	4,483,712,357	100.00
11	Kanwil DJP Jakarta Selatan	748,220,177	2,524,212,756	3,156,337	3,269,276,596	336.94
12	Kanwil DJP Jakarta Timur	0	808,015,754	0	808,015,754	100.00
13	Kanwil DJP Jakarta Utara	438,355,515	1,385,702,841	186,272,820	1,637,785,536	273.62
14	Kanwil DJP Jakarta Khusus	1,045,197,301	639,009,579	489,676,576	1,194,530,304	14.29
15	Kanwil DJP Banten	114,313,147	1,421,163,962	0	1,535,477,109	1,243.22
16	Kanwil DJP Jawa Barat I	0	106,840,796	0	106,840,796	100.00
17	Kanwil DJP Jawa Barat II	0	6,119,051,288	0	6,119,051,288	100.00
18	Kanwil DJP Jawa Tengah I	2,389,052,497	1,431,026,395	281,463,109	3,538,615,783	48.12
19	Kanwil DJP Jawa Tengah II	0	2,583,250,421	1,500,000	2,581,750,421	100.00
20	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	69,281,000	58,945,899	5,233,750	122,993,149	77.53
21	Kanwil DJP Jawa Timur I	898,755,128	2,973,489,461	604,391,810	3,267,852,779	263.60
22	Kanwil DJP Jawa Timur II	1,233,926,688	1,672,192,841	45,068,000	2,861,051,529	131.87
23	Kanwil DJP Jawa Timur III	11,330,000	2,117,390,189	1,620,873,975	507,846,214	4,382.31
24	Kanwil DJP Kalimantan Barat	273,163,943	326,671,575	0	599,835,518	119.59
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0	2,413,359,915	4,983,800	2,408,376,115	100.00
26	Kanwil DJP Kalimantan Timur	0	9,225,206,715	25,329,545	9,199,877,170	100.00
27	Kanwil DJP Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara	3,160,635,422	2,172,434,973	1,072,292,643	4,260,777,752	34.81
28	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	370,784,022	88,561,000	282,223,022	100.00
29	Kanwil DJP Bali	0	1,125,038,089	0	1,125,038,089	100.00
30	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	2,669,103,948	0	2,669,103,948	100.00
31	Kanwil DJP Papua Dan Maluku	0	1,323,430,284	0	1,323,430,284	100.00
32	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	304,335,661	851,118,000	0	1,155,453,661	279.66
Total		11,256,805,661	69,481,721,052	4,882,399,256	75,856,127,457	573.87

Saldo akhir Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp75.856.127.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.599.412.326,00 atau 573,87 persen dari saldo akhir TA 2008 sebesar Rp11.256.805.661,00. Kuantitas Aset Tetap – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2008 sejumlah 57.315 buah yang terdiri atas 450m Jalan, 1 unit Bangunan Air Bersih/Air Baku, 35 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 84 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, 456 unit Alat Angkutan Darat Bermotor, 53 unit Alat Angkutan Darat tak Bermotor, 13.759 buah Alat Kantor, 32.286 buah Alat Rumah Tangga, 2.431 buah Komputer, 5.422 buah Peralatan Komputer, dan lain-lain.

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

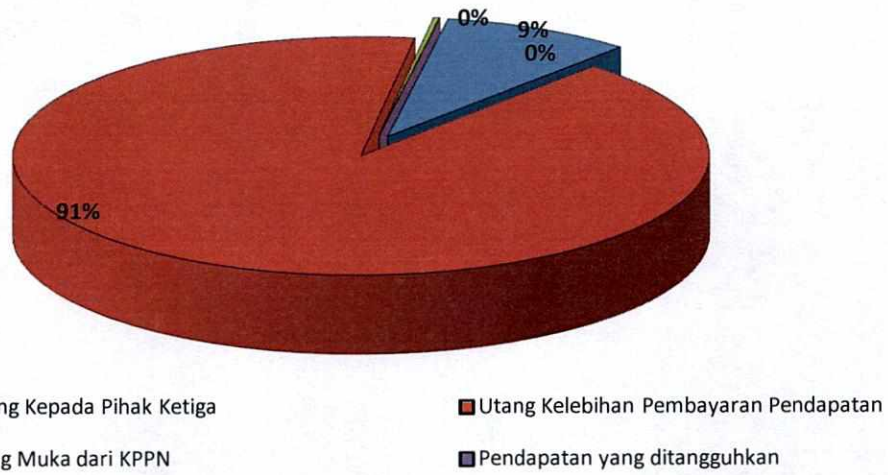
Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Utang per 31 Desember 2009 sebesar Rp313.968.188.842,00. Utang ini terdiri dari Uang Muka dari KPPN, Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Pendapatan Yang Ditangguhkan. Rincian Utang disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.4.a., Tabel IV.C.2.4.b. dan Grafik IV.C.2.4. berikut:

Tabel IV.C.2.4.a
Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2009
Utang kepada Pihak Ketiga	18.736.859.944
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	294.292.169.306
Uang Muka dari KPPN	932.612.895
Pendapatan yang Ditangguhkan	6.546.697
Jumlah	**313.968.188.842**

Grafik IV.C.2.4.a
Komposisi per Jenis Utang Per 31 Desember 2009
(dalam prosentase)



Tabel C.2.4.b
Posisi Utang Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

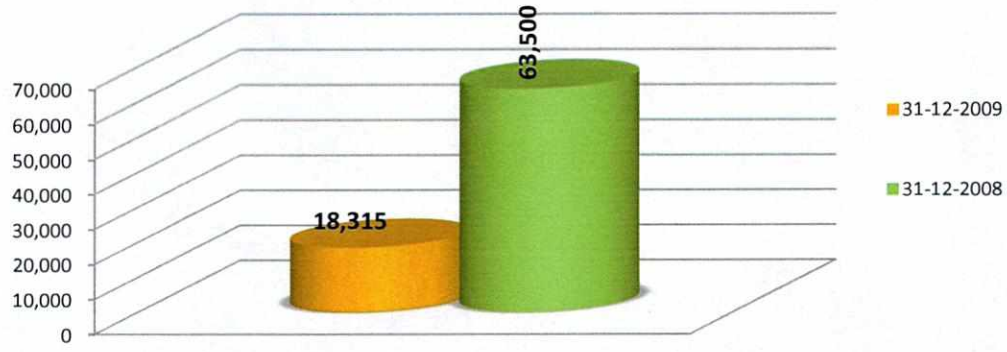
Perkiraan	31-12-2009	31-12- 2008	Kenaikan/ Penurunan
Utang kepada Pihak Ketiga	18.736.859.944	63.500.181.137	(70,49)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	294.292.169.306	248.820.736.013	18,27
Uang Muka dari KPPN	932.612.895	944.963.095	(1,30)
Pendapatan yang Ditangguhkan	6.546.697	1.822.735	259,16
Jumlah	**313.968.188.842**	**313.267.702.980**	**0,22**

C.2.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp18.736.859.944,00. Jumlah tersebut merupakan SPM Imbalan Bunga yang belum diterbitkan SP2D-nya sebesar Rp615.991.452,00 dan penyeimbang dari akun Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp1.347.175.577,00 dan Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp16.773.692.915,00 per 31 Desember 2009.

Grafik IV.C.2.4.1.
Utang kepada Pihak Ketiga TA 2009 dan TA 2008
(dalam jutaan rupiah)



C.2.4.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp294.292.169.306,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah SPM-KP per 31 Desember 2009 belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagaimana Tabel IV.C.2.4.3.a dan Tabel IV.C.2.4.3.b berikut:

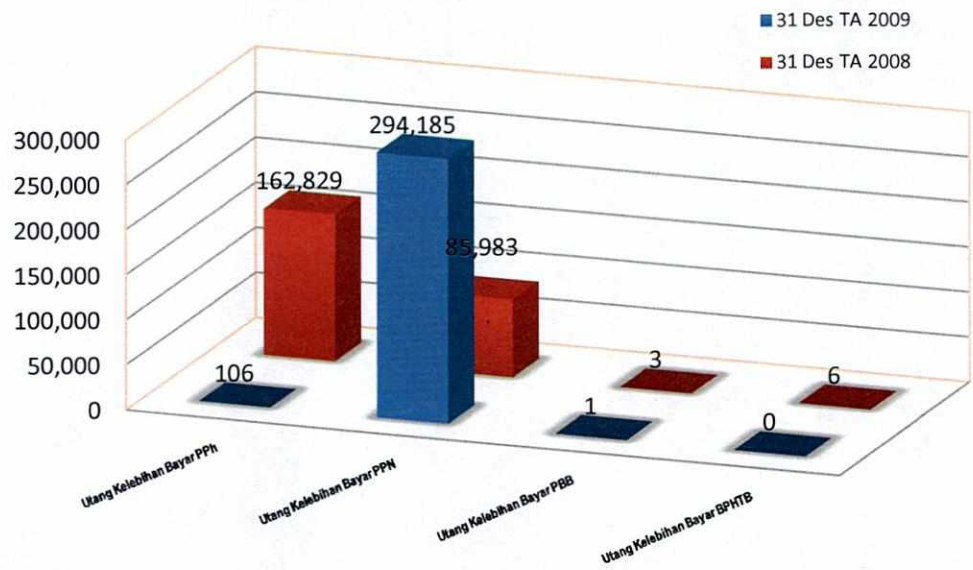
Tabel IV.C.2.4.2.a
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

Jenis Utang	Jumlah
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	106.489.364
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	294.184.868.422
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	811.520
Jumlah	**294.292.169.306**

Tabel IV.C.2.4.2.b
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Jenis Utang	Per 31 Des 2009	Per 31 Des 2008	Kenaikan/ Penurunan
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	106.489.364	162.829.357.506	(99,93)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	294.184.868.422	85.982.655.857	242,14
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	811.520	2.617.507	(96,90)
Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB	0	6.105.143	(100,00)
Jumlah	**294.292.169.306**	**248.820.736.013**	18,27

Grafik IV.C.2.4.2.c
Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam jutaan rupiah)

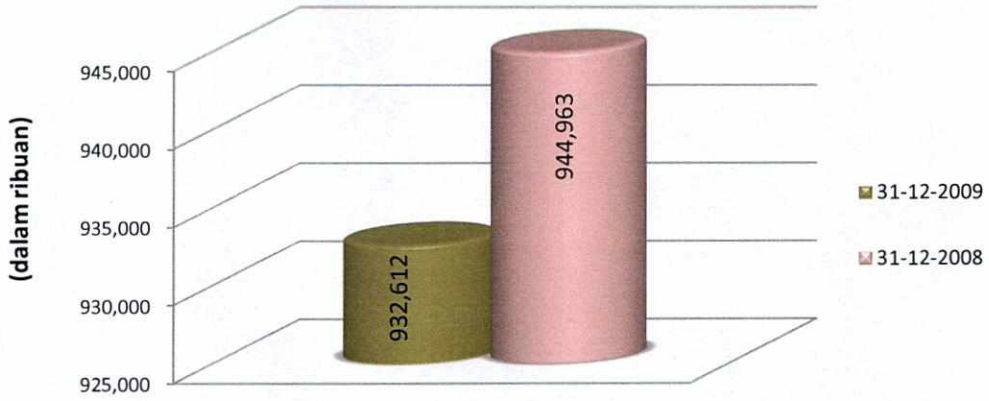


C.2.4.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2008 *audited* sebesar Rp944.963.095,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp932.612.895,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Grafik IV.C.2.4.3.
Perbandingan Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam ribuan rupiah)



C.2.4.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2009 Rp6.546.697,00 merupakan penerimaan jasa giro yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2009. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

Tabel IV.C.2.4.4
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Perkiraan	30-12-2009	31-12-2008	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Yang Ditangguhkan	6.546.697	1.822.735	4.723.962	259,16
Jumlah	6.546.697	1.822.735	4.723.962	259,16

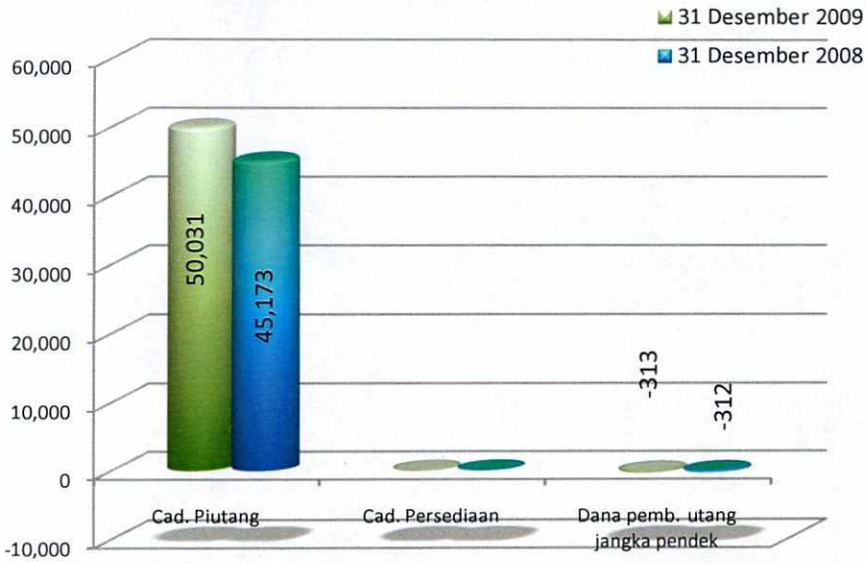
C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2008 *audited* sebesar Rp44.949.759.227.770,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp49.832.046.477.925,00 yang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang terdiri atas :

Cadangan Piutang	Rp	50.031.389.969.069,00
Cadangan Persediaan	Rp	113.685.538.106,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Rp	-313.029.029.250,00

Grafik IV.C.2.5.
Perbandingan Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam milyar rupiah)



C.2.5.1 Cadangan Piutang

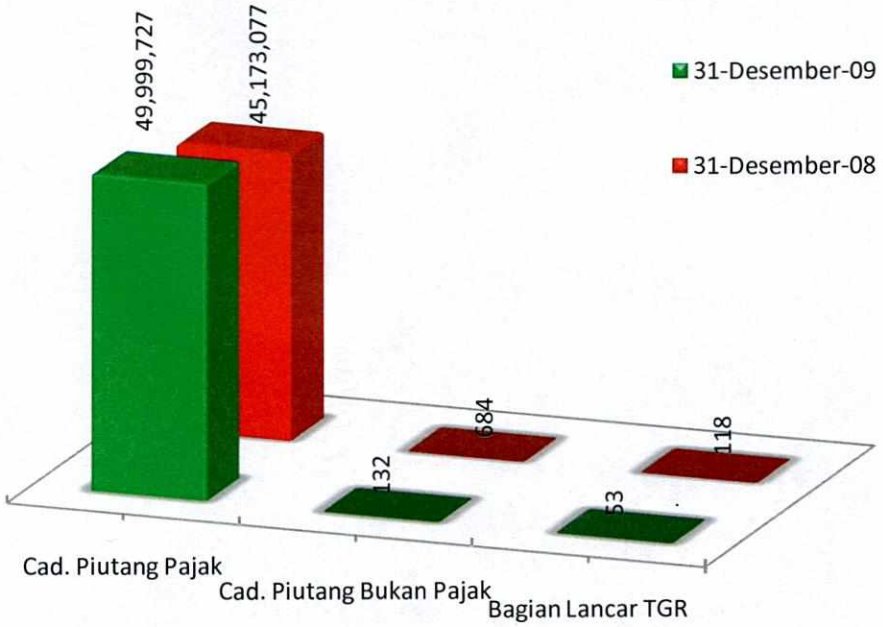
Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2009 Rp50.031.389.969.069,00. Nilai tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari (1) Cadangan Piutang Pajak Rp49.999.727.823.996.00 (2) Cadangan Piutang Bukan Pajak Rp132.694.979,00, (3) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp53.764.428,00, dan (4) Uang Muka Belanja Rp31.475.685.666,00.

Tabel IV.C.2.5.1
Cadangan Piutang Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam jutaan rupiah)

Perkiraan	31-Des-09	31-Des-08	Kenaikan/ Penurunan
Cadangan Piutang Pajak	49.999.727.823.996	45.173.077.395.397	10,66
Cadangan Piutang Bukan Pajak	132.694.979	684.051.351	(80,60)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR	53.764.428	118.258.820	(54,53)
Uang Muka Belanja	31.475.685.666	0	0,00
Jumlah	**50.031.389.969.069**	**45.173.879.705.568**	10,73

Grafik IV.C.2.5.1
Cadangan Piutang Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam jutaan rupiah)



C.2.5.2 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2008 *audited* sebesar Rp88.200.439.352,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp113.685.538.106,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.

C.2.5.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

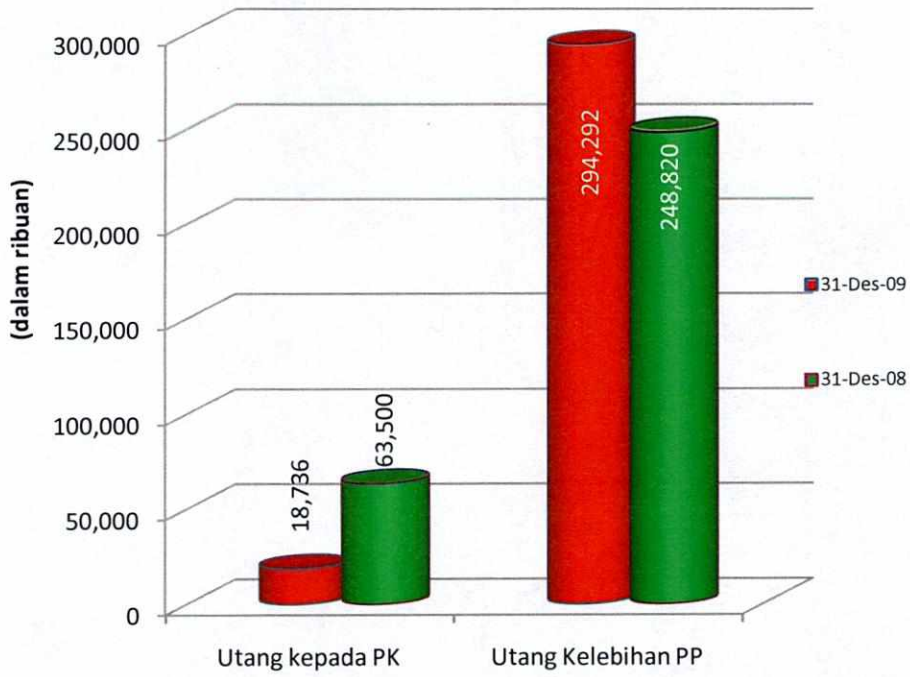
Dana YHDUP Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek Rp313.029.029.250,00. Jumlah tersebut merupakan nilai akun penyeimbang dari (1) Utang kepada Pihak Ketiga Rp18.736.859.944,00 dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp294.292.169.306,00.

Tabel IV.C.2.5.3.
Dana YHDUPUJP Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam rupiah)

Perkiraan	31-Des-09	31-Des-08	Kenaikan / Penurunan
Utang kepada Pihak Ketiga (UKPK)	18.736.859.944,00	63.500.181.137,00	(71,15)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP)	294.292.169.306,00	248.820.736.013,00	28,25
Jumlah	313.029.029.250,00	312.320.917.150,00	8,68

Grafik IV.C.2.5.3.
Perbandingan Dana YHDUPUJP Per 31 Desember TA 2009 dan 2008
(dalam Jutaan rupiah)



C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan

Ekuitas Dana Diinvestasikan

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi per 31 Desember 2009 yang terdiri atas :

-	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp	13.731.730.350.246,00
-	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp	258.084.511.116,00

C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp13.731.730.350.246,00. Nilai ini merupakan nilai akun penyeimbang dari akun (1) Tanah Rp5.868.476.257.110,00 (2) Peralatan dan Mesin Rp3.365.861.808.418,00 (3) Gedung dan Bangunan Rp4.011.871.869.277,00 (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp39.396.538.649,00 (5) Aset Tetap Lainnya Rp188.941.009.001,00 dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp257.182.867.791,00.

C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan Dalam Aset lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp258.084.511.116,00. Nilai ini nilai akun penyeimbang dari akun (1) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp222.122.700,00 (2) Aset Tak Berwujud, Rp182.006.260.959.00, dan (3) Aset Lain-lain Rp75.856.127.457,00.

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

C.3.1 PINTAR

Project for Indonesian Tax Administration Reform **(PINTAR)**

Direktorat Jenderal Pajak dalam TA 2009 melaksanakan reformasi perpajakan tahap ke dua yang juga disebut sebagai PINTAR (*Project for Indonesian Tax Administration Reform)*. PINTAR merupakan *Project Assistance* pada Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai jangka kaktu pelaksanaan 48 bulan (1 Januari 2009 – 1 Januari 2013). Estimasi Total Pendanaan PINTAR adalah sebesar USD 150 juta, terdiri dari Pendanaan Luar Negeri dan Dalam Negeri.

Sebagaimana GFMRAP *(Government Financial Management and Revenue Administration Project*) Tahap I yang dititikberatkan pada *Public Financial Management*, dengan kegiatan utama dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. PINTAR merupakan GFMRAP Tahap II yang difokuskan pada administrasi perpajakan dan dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

C.3.2 Sengketa Pajak

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melayani Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dan dapat mengajukan banding/gugatan atas surat ketetapan pajak kepada Pengadilan Pajak.

Jumlah surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2009 adalah 12.285 ketetapan dengan nominal surat ketetapan pajak yang menggunakan satuan mata uang rupiah sebesar Rp20.298.553.755.359,00 dan nominal surat ketetapan pajak yang menggunakan satuan mata uang valas sebesar USD168.745.881 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Ketetapan	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan	
		IDR	USD
SKP KB/KBT	11.392	16.933.794.811.219	75.149.572
SKB LB	631	3.364.758.944.140	93.596.309
SKP N	262	0	0
Jumlah	12.285	20.298.553.755.359	168.745.881

Selanjutnya, rincian data surat ketetapan pajak berdasarkan jenis dan tahapan sengketa Wajib Pajak dapat dirinci sebagai berikut:

Sengketa	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan	
		IDR	USD
Keberatan	10.064	13.777.395.241.994	96.427.767
Banding	1.417	3.802.691.162.832	58.190.829
Peninjauan Kembali	804	2.718.467.350.533	14.127.286
Jumlah	12.285	20.298.553.755.359	168.745.881

Keputusan atau putusan atas sengketa pajak sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak atau Pengadilan Pajak dapat mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, dan menolak atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

C.3.3 PBB Pertambangan Migas

PBB Pertambangan Migas

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemungutan PBB terutang kepada Wajib Pajak didahului dengan penerbitan SPPT kepada Wajib Pajak, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang yang tercantum dalam SPPT tersebut. Khusus terhadap Wajib Pajak KKKS atau PBB Pertambangan Migas, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari Wajib Pajak pada umumnya terkait dengan keunikan dari Wajib Pajak KKKS tersebut.

Dalam pemungutan PBB Wajib Pajak KKKS terdapat beberapa institusi yang terkait dalam pelaporan, penagihan dan pelunasan PBB terutang kepada Wajib Pajak KKKS, yaitu DJP, BP Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB Migas dapat disampaikan sebagai berikut:

- Wajib Pajak KKKS melaporkan SPOP ke BP Migas. Selajutnya BP Migas melakukan verifikasi dan menyampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;.
- berdasarkan SPOP yang diterima, KPDJP menyampaikan kepada KPP terkait untuk melakukan penelitian dan perhitungan PBB terutang. Selanjutnya KPP melakukan penelitian, perhitungan PBB terutang dan mengajukan persetujuan penerbitan SPPT kepada KPDJP.
- KPP Pratama (DJP) menerbitkan SPPT yang SPPT dicetak tiga rangkap secara manual berdasarkan persetujuan DJP. Selanjutnya SPPT rangkap pertama dan kedua dikirimkan ke KPDJP untuk diteliti dan diteruskan ke DJA. Rangkap ketiga untuk arsip KPP.
- berdasarkan SPPT Wajib Pajak KKKS yang diterima DJA mengajukan permintaan pemindahbukuan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengajukan pemindahbukuan kepada Bank Indonesia untuk diteruskan seluruh Pemerintah Daerah melalui Bank Persepsi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, pengakuan dan pencatatan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan. SPPT diterbitkan setiap awal tahun pada tahun yang bersangkutan.

Untuk tahun Anggaran 2009, penerimaan PBB Pertambangan Migas yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 15,658 triliun dengan rencana penerimaan PBB Pertambangan Migas sebesar Rp 15,788 triliun. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB Pertambangan Migas tahun 2009 dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang disampaikan oleh BPMIGAS kepada Direktorat Jenderal Pajak, PBB Pertambangan Migas tahun 2009 adalah Rp 19,313 triliun. Dibandingkan dengan rencana penerimaan PBB Migas tahun 2009 sebesar Rp 15,788 triliun maka terdapat selisih sebesar Rp 3,525 triliun yang akan dibayarkan di tahun 2010.

Perlu kami informasikan bahwa penerimaan PBB Pertambangan Migas dalam LRA sebesar Rp15,658 triliun, SPPT atas PBB Pertambangan Migas tersebut tidak secara keseluruhan diterbitkan di tahun 2009. Dengan demikian, pembayaran PBB Migas yang dilakukan sebelum SPPT diterbitkan tidak diakui sebagai pengurang piutang PBB Migas karena sebelumnya tidak diakui adanya penambahan piutang PBB Migas. Dalam hal diterbitkan SPPT PBB Migas (ketetapan rampung) tahun 2009 atau sebelumnya di tahun 2010 dengan nilai PBB yang lebih besar dibandingkan nilai yang telah dibayar oleh KKKS pada tahun 2009 maka atas kurang bayar pelunasan tersebut diakui sebagai penambah piutang PBB Migas di tahun 2010.

C.3.4 Penatausahaan Aset

Penatausahaan Aset

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Revaluasi Aset**.
   Atas aset pada DJP yang belum di-IP sesuai temuan pemeriksaan BPK RI adalah sebesar Rp.195.330.450.986,00. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
   a. Terhadap aset-aset yang belum dinilai akan disampaikan permohonan kepada KPKNL terkait untuk merevaluasi BMN yang belum dinilai sebanyak 14 (empat belas) satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
   b. Terdapat aset-aset yang belum dinilai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan nilai Rp.188.737.692.358,00. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, aset senilai Rp.188.557.328.285 telah dilakukan IP dan telah dicatat dalam SIMAK-BMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga nilai aset yang belum dilakukan penilaian sejumlah

Rp.180.364.073,00. Atas aset-aset yang belum dilakukan penilaian akan dilakukan koordinasi dengan KPKNL terkait.

2. **Sertifikasi Tanah**

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.346.404 m2. Terdapat sebanyak 406 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Telah dilakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka sertifikasi tanah.
b. Telah dilakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya 5 Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
c. KPDJP telah memerintahkan seluruh Kanwil DJP untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kanwil BPN di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan sertifikasi tanah.

3. **Penertiban Rumah Dinas** *(Bangunan Tempat Tinggal)*.

Dari 3.022 unit Bangunan Tempat Tinggal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 378 unit yang dihuni oleh orang yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya–upaya pengamanan baik secara administrastif maupun secara hukum. Upaya tersebut antara lain:

a. Upaya Administratif, yaitu :
   1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
   2) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
   3) Telah diusulkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk Rumah Negara yang terdapat di Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Kalimantan Timur sebagai Rumah Negara Golongan I.
   4) Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-83/PJ./2009 tanggal 14 Juli 2009 dimana seluruh Kabag Umum Kanwil DJP terlibat dalam Tim Satuan Tugas tersebut.
   5) Pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: 534/KM.1/2009 tanggal 5 Des 2009.
b. Upaya Hukum, yaitu dengan melaporkan 119 (seratus sembilan belas) orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Tanggapan atas Temuan BPK

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Tahun 2007

Temuan BPK-RI atas LKPP Kementerian KeuanganTahun 2007 yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Nilai Penerimaan pajak yang disajikan tidak dapat direkonsiliasi dengan angka penerimaan pajak dalam dokumen lain yang dipersandingkan.
2. Belum ada kebijakan formal yang memadai terhadap akuntansi atas piutang pajak.

Tanggapan dan tindak lanjut atas temuan BPK RI tahun Anggaran 2007 disajikan dalam lampiran terpisah.

Tahun 2008

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009, masih terdapat temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebenyak 6 butir temuan dan telah ditindak lanjuti DJP sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal salah klasifikasi sebesar Rp326,60 Milyar.
2. Penerimaan Perpajakan DJP sebesar Rp2,99 Trilyun tidak dapat direkonsiliasi dengan SAU dan selisih sebesar Rp210,37 milyar antara SAI dan LAK atas penerimaan perpajakan DJBC tidak dapat ditelusuri ke dokumen sumber.
3. Piutang Pajak dan Piutang PNBP DJBC sebesar Rp281,75 milyar serta penihilan piutang pajak sebesar Rp 747,76 milyar tidak didukung dokumen sumber yang valid.
4. Hasil revaluasi aset tetap sebesar Rp2,10 trilyun belum dicatat, aset tetap minimal sebesar Rp1,95 trilyun dan aset tetap pada 42 satker di DJP belum direvaluasi.
5. Penatausahaan dan pengamanan Aset tetap di lingkungan Kementerian Keuangan minimal sebesar Rp522,13 milyar belum memadai.
6. Software perolehan sebelum tahun 2007 belum diakui sebai aset tak berwujud.

   Tindak lanjut DJP:

Tanggapan dan tindak lanjut Direktorat Jenderal Pajak atas temuan Tim Pemeriksa BPK RI Tahun Anggaran 2008 disajikan dalam lampiran terpisah.

Tahun 2009

1. Temuan LKDJP Semester I TA 2009 dan LK Kanwil DJP Tahun 2009
   a. Tim Pemeriksa BPK RI telah memeriksa LKDJP semester I TA 2009 pada KPDJP dan beberapa instansi vertikal dibawah DJP di kota Jakarta, Batam, Banten, Palu, Mataram, dan Bali.

      Atas pemeriksaan LKDJP Semester I TA 2009 tersebut, BPK RI menyampaikan temuan pemeriksaan LKDJP semester I TA 2009 sebanyak 26 temuan dan telah ditindak lanjuti oleh DJP. Temuan LKDJP semester I TA 2009 antara lain:

1) Terdapat rumah dinas di Kanwil DJP Nusa Tenggara yang dikuasai pihak ketiga
2) Laporan Keuangan lima satker di Kanwil DJP Banten tidak akurat
3) Piutang pajak yang disajikan pada KPP Pratama Denpasar Barat belum dapat diyakini kewajarannya
4) Terdapat salah saji piutang pada KPP Pratama Batam
5) Nilai aset pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Ekstrakomptabel KPP Pratama Palu tidak disajikan secara wajar.

Tindak Lanjut temuan BPK RI Semester I TA 2009 telah dilakukan dan telah dilakukan koreksi kepada satuan kerja masing-masing dengan hasil tindak lanjut disajikan dalam lampiran terpisah.

b. Selanjutnya, Tim Pemeriksa BPK RI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap LK Kanwil DJP TA 2009 di Kanwil DJP Riau dan Kepri, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP Kalimantan Timur, dan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah Gorontalo dan Maluku Utara.

Atas pemeriksaan LK Kanwil DJP TA 2009, BPK RI tmenyampaikan temuan pemeriksaan LKDJP semester I TA 2009 sebanyak 31 temuan dan telah ditindak lanjuti oleh DJP. Temuan LK Kanwil DJP TA 2009 antara lain:

1) Adanya aset negara dalam kondisi rusak berat di Kanwil DJP Riau yang belum diklasifikasikan sebagai barang rusak berat dan dihentikan penggunaannya sebagai barang operasional sebesar Rp31.000.000,00.
2) Penyajian aset dalam neraca BA 999 Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung sebagai UAKPA kurang memadai.
3) Piutang PDRI yang telah dilimpahkan ke KPP belum dicatat sebagai piutang pajak oleh KPP Madya Semarang sebesar Rp1.137.228.522,00.
4) Belum ada perlakuan jelas terhadap selisih PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diakibatkan jumlah PPh pasal 21 DTP yang melebihi anggaran subsidi PPh pasal 21 DTP pada KPP Madya Balikpapan.
5) Pengkapitalisasian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pada KPP Pratama Kotamobagu Senilai Rp13.881.478.264,00 Tidak Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Tindak Lanjut temuan BPK RI atas LK Kanwil DJP Tahun 2009 disajikan dalam lampiran terpisah.

2. Temuan LK DJP Tahun 2009

Temuan LK DJP yang telah disampaikan oleh BPK RI kepada DJP adalah sebanyak 8 kali yaitu:

a. Tahap I adalah temuan mengenai aset, belanja dan penyajiannya di Laporan Keuangan DJP
b. Tahap II adalah temuan mengenai selisih pelunasan MPN pada piutang

dan pengungkapan piutang pajak di Kanwil DJP Jatim I dan II yang belum lengkap

c. Tahap III adalah temuan atas penyajian piutang di satker di Kanwil Jakarta Pusat, Kanwil Jakarta Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Pusat
d. Tahap IV adalah terkait pembangunan gedung kantor di KPP Pratama Kotamobagu
e. Temuan terkait Penerimaan dan revisi penerimaan (selain MPN)
f. Temuan terkait piutang KPDJP
g. Temuan terkait terkait Penerimaan (MPN)
h. Temuan terkait Penerimaan (Revisi)

Secara garis besar temuan Tim Pemeriksa BPK RI terhadap LK DJP BA 015 Tahun Anggaran 2010 sebanyak 44 temuan meliputi:

a. temuan Aset dan Belanja sebanyak 14 Temuan;
b. temuan Piutang Pajak sebanyak 22 temuan;
c. temuan Penerimaan sebanyak 6 Temuan;dan
d. temuan terkait Pembangunan Gedung Kantor KPP Pratama Kotamobagu sebanyak 2 Temuan.

Atas temuan tersebut DJP telah mengirimkan tanggapan kepada Tim Pemeriksa BPK RI. Tanggapan yang disampaikan oleh DJP ke Tim pemeriksa BPK RI disajikan dalam lampiran terpisah.

D.2 REKENING PEMERINTAH

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 4.051 rekening di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rekening tersebut terdiri-dari 1.033 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, 648 rekening ditutup dan 2.373 rekening bank tempat penampungan PBB (Bank TP-PBB) sebagaimana Tabel D.2.

Tabel D.2. Rekening Pemerintah
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah	Saldo
Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan	1.030	518.603.878
Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup	636	366.265.083
Rekening Tempat Penampungan PBB (TP PBB)	2.373	-
Jumlah	4.039	884.868.961

Daftar rekening Rekening Bendahara Pengeluaran yang dipertahankan, Rekening Bendahara Pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi dan ditutup, dan Rekening Tempat Penampungan PBB (TP PBB) sebagaimana Lampiran D.2. sampai dengan Lampiran D.4.

Sunset Policy

D.3 PERPANJANGAN *SUNSET POLICY*

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008. Sebagaimana diketahui pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2008 memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru sebanyak 3.545.076.
2. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang disampaikan sebanyak 556.194 SPT.
3. Jumlah penerimaan PPh sebesar Rp5,56 triliun.

Sedangkan hasil yang diperoleh selama perpanjangan *Sunset Policy* yang mulai berlaku 1 Januri 2009 s.d 28 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) baru sebanyak 2.090.052 NPWP atau sekitar 60% jika dibandingkan dengan penambahan NPWP baru selama tahun 2008 yaitu sebanyak 3.545.076 NPWP baru. Dengan demikian jumlah keseluruhan NPWP baru yang diterbitkan selama berlakunya fasilitas *Sunset Policy* dari 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah 5.635.128 NPWP;
2. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang disampaikan sebanyak 248.620 SPT atau 44,7% jika dibandingkan jumlah SPT dalam rangka *Sunset Policy* yang diterima selama tahun 2008 sebanyak 556.194 SPT. Dengan demikian jumlah SPT dalam rangka *Sunset Policy* yang diterima selama berlakunya fasilitas *Sunset Policy* dari 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah sebanyak 804.814 SPT; dan
3. Jumlah penerimaan PPh sebesar sebesar Rp1,9 triliun atau 34,2% jika dibandingkan jumlah penerimaan PPh dalam rangka *Sunset Policy* selama tahun 2008 sebesar Rp5,56 triliun. Dengan demikian jumlah penerimaan PPh dalam rangka *Sunset Policy* yang diterima selama berlakunya fasilitas *Sunset Policy* dari 1 Januari 2008 s.d 28 Februari 2009 adalah Rp7,46 triliun.

D.4 STIMULUS PPH PASAL 21

Stimulus PPh Pasal 21

Dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja, untuk mengatasinya Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tanggal 3 Maret 2009.

PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori tertentu dan memiliki penghasilan diatas PTKP dan tidak lebih dari 5 juta per bulan. Kategori usaha tertentu yang mendapat fasilitas PPh Pasal 21 DTP adalah:

1. Usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;
2. Usaha perikanan; dan
3. Usaha industri pengolahan.

PPh Pasal 21 DTP tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat pembayaran penghasilan sebesar PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja. Pemberi kerja wajib melaporkan realisasi pemberian PPh Pasal 21 DTP pekerjanya beserta daftar pekerja yang diberi fasilitas PPh Pasal 21 DTP kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat pemberi kerja terdaftar sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 21. Selain itu, pemeberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 DTP kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
PPh Pasal 21 DTP berlaku untuk Masa Pajak Februari 2009 sampai dengan Masa Pajak November 2009 yang dilaporkan paling lambat tanggal 20 Desember 2009. Realisasi DTP PPh Pasal 21 pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp207,268,255,368,00.